



RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2020 - 2024



REVISI II



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR : 15600/Kpts/RC.020/F/10/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR

13973/KPTS/HK.200/F1/12/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN

2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 13973/KPTS/HK.200/F1/12/2020, telah ditetapkan Rencana Strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa dalam perkembangannya telah dilakukan perubahan pada Rencana Strategi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 sehingga perlu penyesuaian Rencana Strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 13973/KPTS/HK.200/F1/12/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
-

8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1647);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 13973/KPTS/HK.200/F1/12/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2020-2024.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 13973/KPTS/HK.200/F1/12/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024.

KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2022 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1647);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 13973/KPTS/HK.200/F1/12/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2020–2024.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 13973/KPTS/HK.200/F1/12/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020–2024.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2022 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,



Nasrullah

NIP 19660223 199303 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
 3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR:15600/Kpts/RC.020/F/10/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN NOMOR 13973/KPTS/
HK.200/F1/12/2020 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN TAHUN 2020-2024

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 telah ditetapkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Strategis untuk periode 2020-2024. Tahun 2020-2024 merupakan periode yang cukup strategis dalam rangka menyongsong tahun 2045 yang diprediksikan oleh pemerintah dan berbagai lembaga internasional bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke 4 di dunia Tahun 2042. Pada saat itu, PDB Indonesia akan mencapai 9,1 juta US\$ dan pendapatan/kapita Rp. 27 juta/tahun serta penduduk berjumlah 310 juta jiwa.

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan utamanya untuk mewujudkan subsektor peternakan yang berdaya saing dalam pemenuhan kebutuhan Indonesia akan protein hewani asal ternak dan peningkatan ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan, dengan pemanfaatan sumber daya lokal yang optimal dan inovasi secara berkelanjutan dan mandiri. Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan sebagai bagian dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional terus mengikuti perkembangan kebijakan dan teknologi untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pencapaian target dan tujuan pembangunan. Selain itu akibat pandemik Corona Virus 19 sebagai konsekuensinya, perlu dilakukan restrukturisasi program dan penganggaran serta perubahan pada fokus kegiatan.

Revisi II Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024 ini untuk mengakomodasi restrukturisasi program dalam redesain sistem perencanaan dan penganggaran, dengan menyelaraskan dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Revisi II Rencana Strategis ini diharapkan juga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan peternakan dan Kesehatan hewan berbasis kinerja yang berkualitas.

Jakarta, 29 Oktober 2021

Direktur Jenderal,



Nasrullah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Kinerja Ekonomi Makro.....	3
1.1.2. Kinerja Teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan	6
1.2. Potensi dan Permasalahan	12
1.2.1. Potensi (Kekuatan dan Peluang)	13
1.2.2. Permasalahan.....	15
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	20
2.1. Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	20
2.2. Misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	21
2.3. Tujuan dan Indikator Tujuan	24
2.4. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program (SP dan IKSP).....	29

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	33
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi	37
3.2. Dukungan Peternakan dan Keswan dalam Pengarusutamaan dan Proyek Prioritas Nasional.....	42
3.3. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan	47
3.3.1. Kerangka Regulasi	47
3.3.2. Kerangka Kelembagaan.....	50
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	54
4.1. Target Kinerja	54
4.2. Kerangka Pendanaan	55
BAB V PENUTUP	57
LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	28
Tabel 3.1	Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) Keterkaitan Indikator RPJMN, Keterkaitan Kementan dan Keterkaitan Ditjen PKH.....	36
Tabel 3.2	Kaitan antara Arah Kebijakan dan Strategi Kementan dan Ditjen PKH.....	40
Tabel 3.3	Arah Kerangka Regulasi/Kebutuhan Regulasi dan Urgensi Kerangka Regulasi.....	48
Tabel 4.1	Indikasi Kebutuhan Pendanaan APBN Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing	3
Gambar 1.2	Pertumbuhan PDB Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2015-2020	3
Gambar 1.3	Investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing	4
Gambar 1.4	Jumlah Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Subsektor Peternakan Tahun 2015-2020	5
Gambar 1.5	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) Tahun 2015-2020	6
Gambar 3.1	Prioritas Nasional (PNI) dan Program Prioritasnya (PP)	34
Gambar 3.2	Kerangka Kelembagaan Ditjen PKH	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Target Produksi Komoditas Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024.....	58
Lampiran 2.	Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ditjen PKH Tahun 2020-2024 (semula).....	106
Lampiran 3.	Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ditjen PKH Tahun 2020-2024 (menjadi).....	125
Lampiran 4.	Investasi PMDN Sub Sektor Peternakan Tahun 2015-2020.....	156
Lampiran 5.	Investasi PMA Sub Sektor Peternakan Tahun 2015-2020	156

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 adalah unit kerja Eselon I yang berada dibawah Kementerian Pertanian, sesuai bagian ketujuh Pasal 20, berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Menteri, dan dipimpin oleh Direktur Jenderal PKH, yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa susunan organisasinya terdiri dari satu orang Eselon I A, 6 orang Eselon II A, 7 orang Eselon II B, 22 orang Eselon III A, dan 21 orang Eselon IV. Fungsi dari Ditjen PKH tersebut dirumuskan menjadi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner serta pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Selain itu, Ditjen PKH berfungsi untuk pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian.

Dalam upaya reformasi birokrasi, pada tahun 2020 telah dilakukan evaluasi terhadap beberapa fungsi dan telah ditetapkan Permentan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Selanjutnya dengan telah ditetapkannya Permentan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kelompok Subtansi dan Subkelompok Subtansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian dan Permentan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kelompok Subtansi dan Subkelompok Subtansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Ditjen PKH;

telah disusun kelompok jabatan fungsional sesuai tugas fungsi Direktorat Jenderal PKH dan telah dirumuskan mekanisme hubungan koordinasi antara JPT dengan kelompok jabatan fungsional. Dengan pemetaan jabatan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi serta mekanisme koordinasi dimaksud diharapkan dapat meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal PKH.

Dengan tugas dan fungsi tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor: 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, diwajibkan kepada Ditjen PKH untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Jangka Menengah sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJMN). Ditjen PKH sebagai salah satu Direktorat Jenderal Teknis yang menjabarkan kebijakan Kementerian Pertanian, maka Ditjen PKH menelaraskan Renstranya dengan Revisi Pertama Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Revisi dilakukan dengan pertimbangan : (1) terdapatnya kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia, menyebabkan terdapatnya perubahan dalam focusing kegiatan, struktur penganggaran dan kebijakan penting yang diambil pada sektor pertanian saat ini, (2) terdapatnya lag waktu proses terbitnya rencana strategis yang terbit lebih dahulu yaitu pada tanggal 04 Mei 2020 dibandingkan dengan keluarnya Surat Edaran Bersama Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 24 Juni 2020 Nomor :S-122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/Lembaga, sehingga dipandang perlu adanya penyesuaian deskripsi terkait target maupun program dan (3) merespon dinamika kebijakan, dengan terdapatnya penambahan kegiatan sesuai dengan direktif Presiden. Revisi Renstra merupakan langkah untuk mengejar target RPJMN 2020-2024 yang terancam meleset akibat pandemi Covid-19.

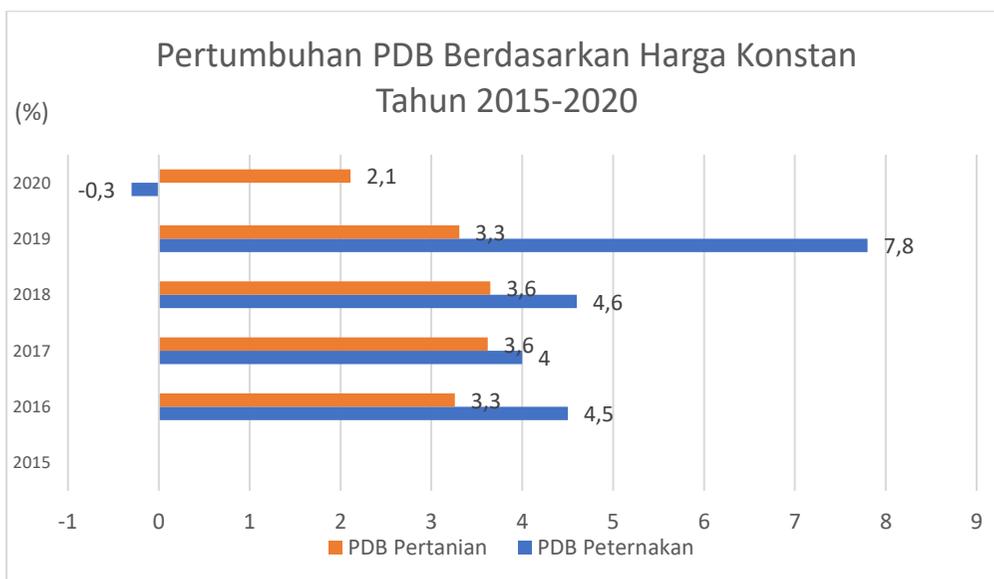
Renstra Ditjen PKH sebagai pijakan pelaksanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2020-2024, yang juga menggambarkan secara utuh capaian kinerja pembangunan sebelumnya yakni : capaian kinerja makro maupun kinerja teknis. Kinerja makro, yaitu Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja dan investasi. Sedangkan kinerja teknis berupa populasi, produksi dan tingkat konsumsi sebagai cerminan pelaksanaan kinerja fungsional yaitu

aspek perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan serta dukungan kesekretariatan.

1.1.1 Kinerja Ekonomi Makro

1. Produk Domestik Bruto

PDB sub sektor peternakan pada periode 2015-2019 menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dari PDB sektor pertanian, namun tahun 2020 PDB peternakan mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,3 persen sebagai dampak dari pandemi virus corona. PDB subsektor peternakan tahun 2015 sebesar Rp.136.936,4 miliar dan meningkat pada tahun 2020 mencapai Rp.167.084,8 miliar (angka sangat sementara), dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,1 persen pertahun, sedangkan PDB sektor pertanian Rp.906.805,5 miliar meningkat menjadi Rp. 1.060.823,1 miliar, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,2 persen pertahun (Sumber: Statistik Peternakan Tahun 2021). Perbandingan pertumbuhan PDB pertanian dan peternakan dapat dilihat pada Gambar 1.1.

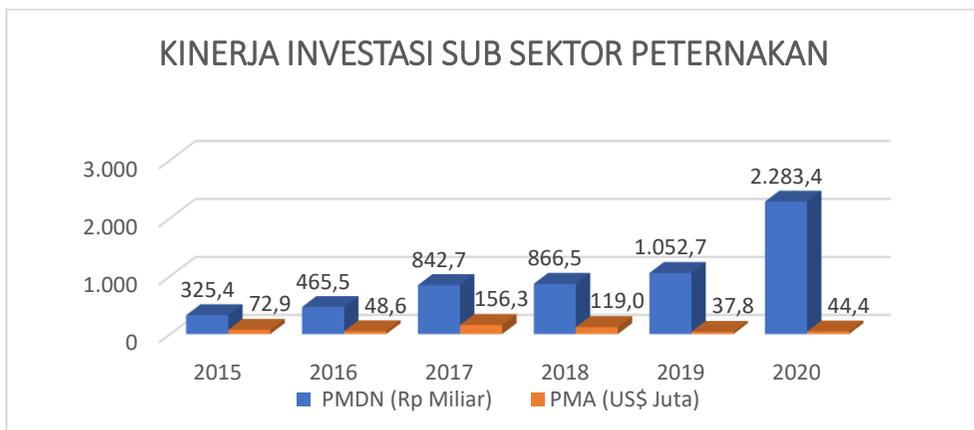


Gambar 1.1 Pertumbuhan PDB Pertanian dan Peternakan Berdasarkan harga Konstan Tahun 2015-2020

2. Investasi

Perkembangan investasi subsektor peternakan dapat dilihat dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi sub sektor peternakan tumbuh positif pada periode tahun 2015-2019 yaitu dari Rp. 326,4 miliar menjadi Rp. 1.503,2 miliar secara kumulatif meningkat sebesar Rp. 726,8 miliar. Apabila dilihat dari sumber investasi, maka secara kumulatif nilai investasi periode 2015-2019 berdasarkan data BKPM, mengalami peningkatan walaupun apabila dilihat pertumbuhan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Nilai investasi sub sektor peternakan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan sebesar 37,10% selama periode 2015-2019. Secara rinci investasi PMDN bidang usaha peternakan dapat dilihat pada lampiran 4. Investasi PMDN subsektor peternakan tahun 2020 meningkat menjadi Rp.2.283,4 miliar.

Nilai investasi sub sektor peternakan dari Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami peningkatan sebesar 24,04% selama periode 2015-2019, dan tahun 2019 apabila dibandingkan pada tahun 2018 maka mengalami penurunan sebesar 68,26%. Nilai investasi PMA subsektor peternakan, sementara peningkatan investasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 221,6 persen (Sumber: BKPM diolah). Secara rinci investasi PMA bidang usaha peternakan dapat dilihat pada lampiran 5. Sebagai gambaran investasi sektor peternakan periode 2015-2020 dapat dilihat pada Gambar 1.3



Sumber: BKPM diolah Ditjen PKH

Gambar 1.3 Investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing

3. Penyerapan Tenaga Kerja

Dalam periode tahun 2015-2020, penyerapan tenaga kerja, subsektor peternakan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,09 persen per tahun, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 4.590.896 orang pada tahun 2020 (BPS, Sakernas-Agustus; diolah Pusdatin, Kementan). Pada tahun 2020, tenaga kerja subsektor peternakan berdasarkan tingkat pendidikan masih di dominasi oleh tenaga kerja dengan Pendidikan Dasar (dari tidak/belum pernah sekolah sampai SD) sebanyak 3.834.475 orang (83,5%), berdasarkan kelompok umur masih didominasi oleh golongan umur tua (60 tahun keatas) sebanyak 1.127.716 orang (24,6%), dan apabila dilihat dari status pekerjaan utamanya adalah pekerja keluarga/tak dibayar sebanyak 1.513.892 orang (35,23 %) (Sumber: Statistik Peternakan Tahun 2021).



Sumber: Statistik Peternakan Tahun 2021

Gambar 1.4 Jumlah Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Subsektor Peternakan Tahun 2015-2020

4. Nilai Tukar Petani Peternak (NTPT)

Nilai Tukar Petani Peternak (NTPT) periode 2019 sebesar 108,04, mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 107,69, namun di Tahun 2020 akibat pandemi mempengaruhi NTPT menurun menjadi 98,10. NTPT lebih dari 100 menunjukkan peternak mengalami surplus dimana harga produksi

naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,26% (Sumber: BPS Tahun 2020).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 1.5 Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) Tahun 2015-2020

1.1.2 Kinerja Teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Populasi Ternak

Rata-rata pertumbuhan populasi ternak periode 2015-2019 (angka tetap) yang mengalami pertumbuhan positif diantaranya sapi potong, sapi perah, domba, dan babi masing-masing sebesar 2,37 persen, 2,23 persen, 1,35 persen, dan 2,29 persen. Namun untuk ternak kerbau dan kambing mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,85 persen dan 0,68 persen. Berdasarkan laporan perunggasan nasional tahun 2017-2019, rata-rata pertumbuhan populasi ayam ras pedaging mengalami peningkatan sebesar 4,19 persen dan ayam ras petelur mengalami penurunan sebesar 4,85 persen (Sumber: Statistik Peternakan Tahun 2021).

Pertumbuhan populasi ternak pada tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya, untuk sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, dan ayam ras petelur tumbuh positif masing-masing sebesar 3,01 persen, 0,53 persen, 1,80 persen, 1,23 persen, dan 2,58 persen. Namun, ada beberapa ternak yang mengalami penurunan pertumbuhan, diantaranya ayam ras pedaging sebesar 7,9 persen, domba 1,74 persen, dan babi 10,76 persen

2. Produksi Ternak

Rata-rata pertumbuhan produksi ternak periode 2015-2019 (angka tetap) yang mengalami pertumbuhan positif yaitu kambing dan domba sebesar 2,93 persen dan 14,40 persen. Namun untuk produksi ternak sapi, kerbau, dan babi mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 0,03 persen, 8,44 persen, dan 6,55 persen. Untuk rata-rata pertumbuhan produksi susu sapi perah sebesar 3,19 persen dan produksi telur ayam buras sebesar 6,93 persen. Berdasarkan laporan perunggasan nasional tahun 2017-2019, rata-rata pertumbuhan produksi daging ayam ras pedaging mengalami peningkatan sebesar 4,93 persen dan telur ayam ras petelur sebesar 1,29 persen (Sumber: Statistik Peternakan Tahun 2021).

Sesuai dengan Renstra tahun 2015-2019 produksi ternak yang tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu telur sebesar 5.355,6 ribu ton (capaian 140,44%) dari target 3.770 ribu ton sedangkan target produksi ternak yang tidak tercapai yaitu: daging sapi/kerbau sebesar 514,4 ribu ton (capaian 68,13%) dari target 755 ribu ton dan susu sebesar 996,44 ribu ton (capaian 93,69%) dari target 1.063,56 ribu ton

Dari aspek konsumsi, menunjukkan bahwa konsumsi daging selama 2015-2020 menunjukkan angka yang berfluktuasi, yaitu konsumsi protein/kapita/hari tersebut disetarakan dengan protein hewani pada tahun 2015 menunjukkan 3,13 gram, sedangkan pada tahun 2020 menjadi 4,05 gram. Konsumsi protein dari telur dan susu pada periode yang sama naik dari 3,23 gram menjadi 3,47 gram (Sumber: Statistik Peternakan Tahun 2021).

3. Sertifikasi Bibit Ternak

Produksi benih dan bibit selama kurun waktu 5 tahun (2015-2019) adalah sebagai berikut : 1) Produksi benih : sebanyak 24.117.522 dosis untuk semen beku dan 5.495 embrio; dan 2) Produksi bibit : sapi potong sebanyak 4.522 ekor; sapi perah 1.467 ekor; kerbau 293 ekor; kambing perah 764 ekor; kambing 1.209 ekor; babi 2.782 ekor; ayam 1.249.429 ekor; serta itik 2.169.993 ekor (Lakin Bitpro 2019). Selain produksi benih dan bibit, tahun 2015-2019 telah mengeluarkan sertifikat sejumlah semen beku 31.938.000 straw, embrio sebanyak 1.526 ekor sapi perah FH 128 ekor, sapi potong 509 ekor, kambing 499 ekor, babi 22 ekor, itik 1 produsen, dan ayam ras 26 produsen. Pada tahun 2020 jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk sapi potong 867 ekor, kambing 420 ekor, sapi perah 107 ekor, semen beku 5.235.000 straw, ayam ras 10 produsen, dan itik 1 produsen (Lakin Bitpro 2020)

4. Status Kesehatan Hewan

Upaya mendukung kegiatan status kesehatan hewan melalui pembebasan penyakit. Dalam periode 2015-2017 telah dilakukan pembebasan terhadap 14 wilayah untuk penyakit Rabies, AI, Brucellosis dan Septicemia Epizootica. Status Kesehatan hewan dalam perdagangan bebas terhadap komoditas hewan, produk hewan sangat penting, kualitas produk peternakan dituntut untuk memenuhi aspek keamanan bagi manusia dan lingkungan. Ancaman penyakit zoonosis dan penyakit lain yang berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi yang besar sangat mempengaruhi terhadap ekspor impor produk peternakan baik hewan maupun produk hewan.

Dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 78,1 % terjadi kenaikan persentase wilayah yang terkendali PHMS sebesar 2,4%. Dibandingkan dengan target jangka menengah dimana target pada akhir tahun 2024 sebesar 81% capaian masih 98,8% ditargetkan akan mencapai 100% di tahun 2024.

Seluruh kegiatan Direktorat Kesehatan Hewan mendukung keberhasilan pencapaian persentase wilayah yang terkendali PHMS, antara lain Kegiatan Pengamatan dan identifikasi Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan, Penguatan Kelembagaan Veteriner dan Sumber Daya Keswan, Produksi Obat dan Bahan Biologik, Pengawasan Obat Hewan dan pengawasan lalu lintas hewan dan biosecurity.

Pada saat ini terdapat 8 dari 34 Provinsi di Indonesia yang berstatus bebas rabies yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Papua dan Papua Barat). Sedangkan pulau yang telah dibuktikan bebas rabies yaitu P. Lombok (bebas historis), P. Pisang, P. Meranti, P. Weh, P. Mentawai dan P. Enggano (2015), P. Tarakan, P. Nunukan, P. Sebatik dan Pulau Tabuan (2018), Pulau Makalehi, Buhias, Pahepa, Tagulandang, Ruang, Biaro Kab Kep Sitaro (2019).

Hingga akhir tahun 2020, terdapat 3 provinsi yang memiliki status bebas HPAI berdasarkan SK Menteri yaitu Provinsi Papua, Maluku dan Maluku Utara. Total wilayah yang bebas HPAI sebanyak 50 kabupaten/kota. Sedangkan untuk kompartemen bebas AI selama tahun 2020 tercatat sebanyak 65 unit dengan rincian sebagai berikut:

1. Grand Parent Stock : 9 unit
2. Parent Stock : 24 unit
3. Final Stock : 19 unit
4. Hatchery : 13 unit

Pada saat ini, wilayah yang telah berhasil dibebaskan antara lain Provinsi Bali dan Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat (2002), Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (2006), Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Tengah (2009), Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu (2011), Pulau Sumba Provinsi NTT dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur (2015), Provinsi Sumatera Utara (2016), Provinsi Banten dan Kabupaten Simelue (2019). Sedangkan status bebas secara sistem kompartementalisasi perbibitan sapi dan

kambing perah telah berhasil ditetapkan untuk BBPTU-HPT Baturraden pada tahun 2018 lalu, sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian Nomor 311/Kpts/PK.400/4/2018 tanggal 27 April 2018.

Total Provinsi yang bebas brucellosis hingga tahun 2020 adalah 17 provinsi (222 kabupaten/kota) dan 3 pulau dan 1 unit kompartemen.

5. Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional serta Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis

Upaya penjaminan keamanan dan mutu pangan strategis nasional serta pengendalian dan penanggulangan zoonosis dilaksanakan melalui penjaminan higiene dan sanitasi, penjaminan produk hewan, penerapan kesejahteraan hewan, penetapan zoonosis prioritas, manajemen risiko, kesiagaan darurat, pemberantasan zoonosis dan partisipasi masyarakat.

Penjaminan higiene dan sanitasi dilaksanakan dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi produk Hewan, yang meliputi rantai produksi di tempat budidaya, tempat produksi pangan asal hewan, tempat produksi produk hewan nonpangan, rumah potong hewan, tempat pengumpulan dan penjualan serta dalam pengangkutan. Penjaminan higiene dan sanitasi di unit usaha produk hewan dilaksanakan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner. Nomor Kontrol Veteriner adalah Nomor Registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.

Penjaminan produk hewan baik yang diproduksi, dimasukkan dari dan/atau dikeluarkan ke luar negeri, dan yang diedarkan didalam negeri dilakukan melalui pengaturan peredaran produk hewan, pengawasan unit usaha produk hewan, pengawasan produk hewan, pemeriksaan dan pengujian produk hewan, standarisasi produk hewan, sertifikasi produk hewan serta registrasi produk hewan.

Pelaksanaan kegiatan penetapan zoonosis prioritas, manajemen risiko, kesiagaan darurat dan pemberantasan zoonosis dilakukan melalui koordinasi, komunikasi dan kolaborasi lintas sektor terkait. Sedangkan keikutsertaan masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pemantauan dan

tindakan cepat kejadian zoonosis, diantaranya dengan membentuk kader pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis di daerah.

Sampai dengan tahun 2019, terdapat unit usaha produk hewan yang telah memiliki sertifikat NKV sebanyak 2.453 unit usaha, meningkat 233 unit usaha dari tahun 2018 sebanyak 2.020 unit usaha. Sedangkan untuk jumlah kasus pangan segar asal hewan yang membahayakan kesehatan manusia terjadi penurunan kasus, dari 16 kasus di tahun 2018 menjadi 10 kasus di tahun 2019.

Terkait dengan monitoring surveilans keamanan pangan produk hewan, telah dilakukan pengujian terhadap 30.745 sampel produk hewan, dengan hasil sebanyak 81% produk hewan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. Selain itu dalam upaya memenuhi persyaratan kesehatan produk hewan untuk ekspor, pada tahun 2019 telah dikeluarkan sebanyak 3.439 Sertifikat Veteriner, yang meningkat dibandingkan tahun 2018 sebanyak 3.332 Sertifikat Veteriner. Peningkatan penerbitan sertifikat veteriner ini menunjukkan bahwa produk hewan asal Indonesia telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor dan berdaya saing (Lakin Ditjen PKH 2019).

6. Penyediaan Infrastruktur Peternakan

Penyediaan infrastruktur peternakan tahun 2015-2019 diprioritaskan untuk penyediaan sarana dan prasarana RPH-Ruminansia dan tempat pemotongan hewan kurban. Total kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan) yaitu RPH atau fasilitas pemotongan hewan kurban berdasarkan kebutuhan (pasca panen pangan hewani asal ternak) sebanyak 519 unit dengan pertimbangan bahwa RPH atau fasilitas pemotongan hewan kurban tersebut dimiliki oleh setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Sampai dengan tahun 2019 rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak ditargetkan sebesar 30%. Adapun realisasi ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) sebesar 34,60% dari target 30% (tersedia sebanyak 178 unit) (Lakin Ditjen PKH 2019).

7. Peningkatan Volume dan Nilai ekspor

Capaian kinerja pertumbuhan volume ekspor produk pangan hewani asal ternak tahun 2019 sebesar 78,65 % atau meningkat 314,60 % dari target 25 % dan bila dilihat secara volume, ekspor tahun 2019 sebesar 32.491,14 ton meningkat dari tahun 2018 sebesar 29.145,04 ton. Apabila dilihat dari nilainya, ekspor hewani asal ternak tahun 2019 sebesar US\$ 78.654.179,58 meningkat dari tahun 2018 sebesar US\$ 71.190.478,16 atau rata-rata pertumbuhan sebesar 62,92% (Lakin Ditjen PKH 2019).

Volume ekspor produk pangan hewani asal ternak terdiri dari volume ekspor 7 (tujuh) komoditas, yaitu: ternak kambing, domba, babi, daging ayam potong, telur tetas, anak ayam (*Day Old Chick - DOC*), serta obat hewan. Ekspor ternak babi selama periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,83% per tahun.

Ekspor ternak kambing dan domba selama periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan untuk ternak kambing (95,85%) sedangkan ternak domba baru mulai diekspor pada tahun 2018 sebesar 81,5 ton. Telur ayam tetas, daging ayam dan produk olahannya serta obat hewan merupakan komoditas yang berkontribusi terhadap peningkatan volume ekspor pada tahun 2015-2019. Sedangkan DOC baru diekspor pada tahun 2018-2019 dengan tujuan ekspor adalah Timor Leste.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Untuk melihat potensi dan permasalahan pada pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dapat dilihat dari faktor lingkungan strategis internal maupun eksternal yang akan berpengaruh terhadap kinerja pembangunan peternakan. Lingkungan strategis internal mencakup aspek kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal mencakup aspek ancaman dari luar dan peluang yang dapat dimanfaatkan. Hasil identifikasi faktor internal dan eksternal tersebut kemudian dianalisis dengan metode SWOT, untuk memilih aspek aspek internal dan eksternal strategis untuk dijadikan dasar dalam merumuskan alternatif strategi prioritas dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

1.2.1 Potensi (Kekuatan dan peluang)

Potensi yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan peternakan dan kesehatan hewan antara lain: jumlah penduduk yang besar, keanekaragaman hayati, teknologi dan pasar luar negeri

1. Jumlah Rumah Tangga Peternakan 13,56 juta orang (Sutas, 2018)

Peternakan merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sudah dilakukan masyarakat Indonesia secara turun menurun. Usaha peternakan dilakukan oleh masyarakat secara polivalen (terpadu) dengan kegiatan ekonomi lainnya di bidang pertanian. Dengan banyaknya masyarakat melakukan usaha peternakan walupun dengan skala yang kecil dan dikelola secara sambilan, usaha peternakan ini memiliki peran dalam menopang ekonomi masyarakat. Pada tahun 2019 jumlah rumah tangga peternakan sebanyak 13,56 juta rumah tangga atau sebesar 21,43% dari rumah tangga pertanian. Berdasarkan Sensus 2010, sampai tahun 2040 akan terjadi ledakan penduduk berusia muda di Indonesia atau bonus demografi. Hal ini juga merupakan peluang untuk mendorong usia produktif melakukan usaha dibidang peternakan, sehingga terjadi regenerasi dan penambahan pelaku usaha peternakan.

2. Sumber daya peternakan yang cukup tersedia (keragaman genetik ternak, dan ragam pangan olahan)

Indonesia sebagai suatu negara agraris mempunyai sumber daya alam dan ternak yang sangat besar dan beragam. Keberagaman sumber daya ternak yang tersebar diwilayah-wilayah belum mampu dimanfaatkan secara ekonomis dalam menghasilkan produk-produk peternakan. Dukungan sumber daya alam lainnya, utamanya dalam penyediaan pakan untuk pertumbuhan ternak sangat besar dengan keragaman yang cukup tinggi. Disamping itu, keragaman budaya dari masyarakat yang sangat heterogen menghasilkan berbagai ragam produk pangan hasil ternak yang merupakan kekuatan penyediaan terhadap produk peternakan.

Keragaman budaya Bangsa Indonesia yang sangat heterogen menghasilkan berbagai ragam produk pangan asal ternak, baik dari masakan dari produk segar maupun produk olahan hasil ternak.

Hal ini merupakan kekuatan dalam penyediaan produk peternakan kepada konsumen atau masyarakat secara lebih luas, tidak pada sentra produksi saja, sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil peternakan.

3. Sinergi dan dukungan peternak, akademisi dan pemerintah yang tersedia.

Keberhasilan pembangunan peternakan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, antara lain pemerintah, swasta dan akademisi. Peran pemerintah sebagai fasilitator, motivator dan stabilisator merupakan modal penting dalam menubuhkan usaha peternakan yang kondusif dan berkeadilan utamanya bagi peternak rakyat untuk berkontribusi dalam pembangunan peternakan Indonesia.

Untuk itu peternak rakyat, sebagai subjek pembangunan yang kreatif dan dinamik harus terus didorong untuk terlibat dalam proses pembangunan peternakan. Pemberdayaan peternak berarti meningkatkan kemampuan dan kemandirian peternak. Pemberdayaan peternak dapat dilakukan dengan cara: menciptakan iklim usaha yang memungkinkan peternak berkembang; meningkatkan kemampuan peternak melalui berbagai pemberian bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial serta pengembangan kelembagaan di daerah; dan menciptakan kemitraan peternakan yang saling menguntungkan

4. Pangsa Pasar ekspor produk peternakan meningkat

Pada periode 2015-2019, beberapa produk ternak mengalami peningkatan produksi antara lain daging ayam ras pedaging (23,39%), telur ayam ras petelur, ayam buras, daging kambing meningkat sebesar 55,66%; 3,82% dan 20,78. Kelebihan produksi ini dapat dijadikan peluang ekspor keluar negeri. Peluang ekspor semakin terbuka dengan status kesehatan hewan yang dimiliki Indonesia yaitu bebas penyakit list A (PMK). Peluang ekspor kambing dan domba sangat potensial mengisi segmen pasar di Asia dan Timur Tengah ditopang dengan keunggulan komparatif yang ada.

5. Kesadaran global tentang keamanan pangan (*food safety*), *bio security* dan kesejahteraan hewan

Beragamnya produk pangan hasil ternak diharapkan dapat meningkatkan pola konsumsi pangan untuk pemenuhan protein hewani asal ternak. Seiring meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat akan mendorong kesadaran masyarakat untuk menuntut ketersediaan pangan yang aman dan berkualitas. Untuk itu, Pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan regulasi penjaminan mutu dan keamanan pangan, termasuk didalamnya standard tata cara budidaya dan produksi serta standard produk peternakan dan kesehatan hewan. Pemerintah membina dan mengawasi penerapan standard pada pelaku usaha serta mendorong sertifikasinya. Penjaminan mutu dan keamanan pangan dimaksud termasuk penerapan biosecurity dan kesejahteraan hewan pada sistem budidaya.

6. Inovasi dan Teknologi

Sumber daya peternakan yang ada perlu dimanfaatkan secara optimal dengan inovasi teknologi. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian bersama perguruan tinggi dan Lembaga penelitian lainnya telah menghasilkan berbagai paket teknologi tepat gunayang dapat digunakan untuk mengembangkan potensi sumber daya peternakan dalam upaya peningkatan produksi, produktifitas dan kualitas produk peternakan. Berbagai varietas ternak unggul, alat dan mesing peternakan dan Kesehatan hewan, bioteknologi, aneka teknologi budidaya, teknologi pakan, pasca panen dan pengolahan telah tersedia. Untuk mendukung adopsi teknologi oleh peternak diperlukan dukungan permodalan dan desiminasi teknologi secara intensif

1.2.2 Permasalahan

1. Usaha peternakan yang bersifat Subsiten dan rendahnya partisipasi kelembagaan Peternak

Pola pengelolaan usaha peternakan oleh rumah tangga masih sederhana dengan skala kepemilikan yang kecil dan bersifat sambilan, khususnya untuk usaha ternak besar dan kecil. Hampir 95% juta rumah tangga peternak tinggal di pedesaan dan tersebar diberbagai wilayah dengan

orientasinya masih peningkatan produksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dengan manajemen atau sistem pengelolaan korporasi peternak yang memiliki dimensi strategis dalam pengembangan kawasan peternakan karena dibentuk dari, oleh, dan untuk peternak.

Sebagian besar rumah tangga peternak memiliki usaha peternakan skala usaha mikro dan kecil, sehingga belum memenuhi skala kelayakan usaha. Fasilitasi permodalan yang sesuai dengan karakteristik usaha peternakan masing-masing jenis ternak sangat diperlukan untuk naik kelas, selain untuk meningkatkan skala usaha juga untuk adopsi teknologi tepat guna. Usaha peternakan menggunakan komponen utama produksi adalah ternak yang merupakan makhluk hidup, kematian ternak akan berakibat pada keberlangsungan usaha, untuk itu asuransi ternak sangat diperlukan dalam menjamin keberlanjutan usaha.

Hasil SQUT 2017 menyebutkan bahwa partisipasi peternak yang mengikuti bimbingan penyuluhan usaha peternakan hanya sebesar 5,65 %, dan dari jumlah tersebut 7,86% adalah peternak sapi potong. Informasi terkait pengolahan hasil produksi, pengobatan ternak dan penyusunan ransum merupakan informasi yang paling dibutuhkan oleh peternak. Sebanyak 82.13% peternak tidak mengikuti penyuluhan dan bimbingan teknis usaha peternakan dimana 79,73 % adalah peternak sapi potong. Alasan dominan peternak tidak mengikuti bimbingan dan penyuluhan usaha peternakan adalah peternak merasa tidak perlu dengan materi penyuluhan yang diberikan. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan karena tanpa adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengelolaan ternak dan pengelolaan usaha peternakan melalui kegiatan penyuluhan dan/atau bimbingan teknis dan manajemen usaha maka risiko ketidakberhasilan kegiatan harus dapat segera dimitigasi.

2. Rendahnya pemanfaatan plasma nutfah sebagai keunggulan komparatif untuk dikembangkan secara ekonomis.

Indonesia yang memiliki keanekaragaman plasma nutfah ternak yang tersebar di wilayah Indonesia, namun keunggulan komparatif ini belum dapat dimanfaatkan secara ekonomis untuk didorong sebagai keunggulan kompetitif dalam menghasilkan produk-produk peternakan. Untuk meningkatkan pengembangan dan kontribusi plasma nutfah ternak Indonesia, dapat dilakukan

pengembangan dan perbaikan mutu genetic secara terus menerus, sekaligus dikembangkan secara ekonomis melalui kawasan sumber bibit ternak. Peran swasta dalam pembibitan dan pembiakan ternak masih rendah, sementara konsumsi dapat mengakibatkan pengurangan populasi. Untuk itu, Pemerintah harus mendorong swasta melakukan pembibitan dan pembiakan dengan fasilitas investasi, salah satunya dengan insentif *tax allowance*.

Peran swasta dalam pembibitan dan pembiakan ternak masih rendah, sementara konsumsi dapat mengakibatkan pengurangan populasi. Untuk itu, Pemerintah harus mendorong swasta melakukan pembibitan dan pembiakan dengan fasilitas investasi, salah satunya dengan insentif *tax allowance*

3. Keterbatasan lahan untuk subsektor peternakan.

Permasalahan yang dihadapi subsektor peternakan adalah kepastian lahan dan semakin berkurangnya lahan peternakan karena kebutuhan lahan sektor pertanian lainnya lebih diutamakan. Tidak semua daerah dalam Rencana Tata Ruang Daerah menetapkan adanya lahan untuk pengembangan usaha peternakan termasuk penyediaan padang gembala untuk penyediaan pakan dan pelayanan teknis. Permasalahan juga dijumpai oleh calon investor bidang usaha peternakan dalam mencari lahan untuk usaha. Tidak mudah mendapatkan lahan dengan status yang *clear and clean*. Selain itu, sebagian besar usaha peternakan merupakan skala rumah tangga dan lokasinya disekitar rumah, sehingga diperlukan pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi.

4. Ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan dan liberalisasi pasar

Persaingan dan globalisasi ekonomi yang melanda dunia, termasuk dalam investasi asing. Liberalisasi pasar dengan semakin terbukanya informasi pasar mendorong negara mencari pasar yang paling menguntungkan. Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar nomor 4 di dunia, menjadi pasar yang sangat besar bagi dunia. Negara lain berlomba-lomba untuk masuk pasar Indonesia, sehingga pemanfaatan pasar domestik secara optimal merupakan keniscayaan yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Persaingan dan liberalisasi berdampak pada pesatnya

perkembangan teknologi sehingga arus informasi dan transportasi ke negara lain semakin dekat, terutama masuknya barang-barang luar negeri. Selain itu, Indonesia saat ini merupakan negara pengimpor hasil ternak terutama daging sapi, ternak hidup, dan bibit ayam ras. Dari sisi industri, Indonesia mengimpor kulit ternak, bahan baku pakan asal ternak seperti meat meal dan bone meal, tepung ikan, jagung dan berbagai feed suplement pakan ternak. Ketergantungan bahan utama industri dari impor ini sangat mempengaruhi perkembangan peternakan dalam negeri. Untuk mengantisipasi ketergantungan impor produk peternakan, yang dapat dilakukan dengan melakukan pengolahan, distribusi dan pemasaran produk peternakan dan kesehatan hewan yang berkualitas dan berdaya saing.

5. Lemahnya Posisi dalam Perjanjian Internasional

Terbukanya pasar global harus disertai persiapan yang matang terutama perjanjian internasional utamanya dalam hal perdagangan atau arus barang. Perjanjian yang tidak disikapi dengan matang dan lemahnya posisi tawar akan mengancam industri peternakan dalam negeri dan kedaulatan negara Indonesia. Indonesia sebagai negara anggota *World Trade Organization* (WTO) harus mengantisipasi fenomena dan dinamika perkembangan internasional maupun regional terutama dalam bidang perdagangan hewan dan produknya melalui reorientasi terhadap kebijakan perdagangan dengan memfokuskan perhatian terhadap salah satu aspek yang sangat penting dari perjanjian GATT yaitu "Perjanjian tentang Kesehatan Manusia, Hewan dan Tumbuhan" (*Sanitary and Phytosanitary/SPS*).

Dari aspek kesehatan hewan, meningkatnya lalu lintas hewan dan produknya akan membawa risiko masuknya penyakit hewan ke wilayah Indonesia. Indonesia yang telah dinyatakan bebas terhadap 13 dari 15 penyakit hewan menular menurut daftar A dan beberapa penyakit menurut daftar B dari OIE (*Office Internationale des Epizooties*) perlu mengantisipasi melalui reorientasi kebijakan dengan menepati kesepakatan perjanjian *Sanitary and Phytosanitary* untuk keamanan pangan dan perlindungan kesehatan hewan dan tumbuhan.

6. Dampak Covid – 19 terhadap Pembangunan Peternakan

Pada 11 Maret 2020, World Health Organization mengategorikan Covid-19 menjadi pandemi, dimana penyebarannya membuat WHO menyatakan situasi darurat dan digolongkan menjadi pandemi kronis (WHO, 2020) dan di Indonesia, Presiden RI telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan menetapkan sebagai bencana nasional melalui Kepres 12/2020. Kondisi pandemi Covid-19 telah menekan pertumbuhan ekonomi global dan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi khususnya di sektor pertanian.

Kementerian Pertanian dalam Publikasi Buletin Vol. 1 No. 2 tahun 2020 menyatakan bahwa telah terganggunya rantai pasokan global dan ketersediaan pangan pokok baik harga dan kuantitas di kota-kota tertentu. Hal ini didorong dengan timbulnya panic buying dan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Petani sebagai produsen usahatani tentunya terkena dampak dikarenakan terhambatnya akses menyebabkan penurunan serapan hasil tani dan menurunkan permintaan pada konsumen akhir.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

2.1. Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sesuai dengan arahan Presiden yang menjelaskan bahwa hanya ada visi dan misi presiden dan wakil presiden, maka Kementerian dan Lembaga dalam perumusan visi dan misi-nya, harus selaras dengan visi dan misi presiden dan wakil presiden dalam RPJMN 2020-2024, untuk visi yaitu :

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Selanjutnya untuk menyelaraskan dan mendukung visi pemerintah tersebut maka visi Kementerian Pertanian mendukungnya dengan:

“Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Selaras dengan kedua visi di atas, Ditjen PKH sebagai salah satu Eselon I di bawah Kementan merumuskan visi sebagai berikut:

“Terwujudnya peternakan indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern”.

Visi Ditjen PKH bermakna:

1. Peternakan Indonesia yang berdaya saing mampu meningkatkan nilai tambah produk dan berorientasi ekspor. Daya saing subsektor peternakan adalah kemampuan sub sector peternakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas peternakan.
2. Peternakan indonesia yang berkelanjutan adalah suatu proses yang terus menerus berbasis sumber daya lokal untuk penyediaan pangan masyarakat sesuai perkembangan kebutuhan dalam jumlah dan mutu.

3. Kegiatan produksi peternakan dan kesehatan hewan tidak bertentangan dengan aspek agama, adat istiadat dan lingkungan hidup, bergerak lebih dinamis (maju), optimalisasi sumber daya secara mandiri, dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang tepat guna (modern).

2.2. Misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Upaya strategis dalam mewujudkan visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dirumuskan melalui misi organisasi yang tidak terlepas dari tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan benih/bibit dan produksi ternak yang berkualitas dan berkelanjutan.

Bibit dan benih ternak merupakan bagian yang sangat penting dalam pengembangan peternakan. Dari bibit/benih ternak yang berkualitas akan dihasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing. Pengembangan benih dan bibit ternak yang berkualitas harus mampu dihasilkan secara berkelanjutan berdasarkan potensi sumber daya lokal ternak yang dimiliki. Keragaman sumber daya lokal ternak yang merupakan kekuatan yang harus mampu dimanfaatkan sebagai penghasil bibit dan benih ternak yang berkualitas untuk menghasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing.

2. Meningkatkan ketersediaan pakan yang berkualitas secara berkelanjutan

Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan baik pembibitan, pengembangbiakan maupun penggemukan. Untuk menghasilkan pakan yang berkelanjutan penggunaan bahan pakan lokal maupun biomassa ikutan dari hasil tanaman yang ada disekitar. Bahan pakan lokal yang tersedia baik berupa hijauan pakan unggul, biji-bijian dan produk ikutan dari industri belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan dan penyediaan benih/bibit unggul, pemanfaatan bahan lokal spesifik lokasi, dan pemanfaatan teknologi pakan merupakan faktor penentu dalam mencapai hasil dan efisiensi produksi.

3. Mewujudkan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat.

Kesehatan hewan merupakan komponen yang penting pada usaha peternakan dalam menghasilkan produk disamping juga mempengaruhi pada kesehatan masyarakat di sekitarnya. Penguatan kesehatan hewan adalah pengembangan kesehatan hewan sebagai bagian dari pembangunan pertanian melalui pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat dan bagian dari kesehatan masyarakat melalui pencegahan penyakit zoonosis serta bagian dari kesehatan lingkungan melalui kelestarian hewan dan lingkungannya.

Untuk mencapai produktivitas ternak secara optimal hanya dapat terpenuhi jika status dan kondisi kesehatan hewan dalam keadaan yang baik. Salah satu tolok ukur utama dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan peternakan adalah melalui evaluasi peningkatan produktivitas ternak serta kinerjanya.

Disisi lain, resistensi antimikroba saat ini berkembang menjadi isu global yang dibahas dalam berbagai forum internasional, dan dipandang sebagai salah satu ancaman yang serius untuk ditangani bersama. Untuk mengoptimisasi dan mengurangi resistensi antimikroba di bidang peternakan dan kesehatan hewan, maka penatagunaan antimikroba harus diterapkan untuk meningkatkan penggunaan antimikroba yang bijak dan bertanggung jawab.

Dalam hal ini, penatagunaan antimikroba di bidang peternakan dan kesehatan hewan merupakan program terkoordinasi yang mempromosikan penggunaan antimikroba yang tepat dan sesuai aturan, yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesembuhan pasien, mengurangi resistensi mikroba dan mencegah penyebaran infeksi yang disebabkan oleh organisme yang resistan terhadap berbagai jenis antimikroba (termasuk antibiotik dan antiprotozoa).

4. Meningkatkan keamanan dan mutu produk hewan serta kesehatan masyarakat

Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan rantai penghubung antara kesehatan hewan dan produk hewan, kesehatan manusia, serta kesehatan lingkungan. Oleh karena itu penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat

untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan, penjaminan produk hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan produk hewan, penerapan kesejahteraan hewan serta pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Produk hewan yang aman yang berkualitas merupakan faktor kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, sehingga produk hewan nasional dapat bersaing di pasar internasional.

5. Meningkatkan usaha peternakan, pengolahan dan pemasaran produk peternakan berdaya saing

Potensi basis komoditas dan produk unggulan sub sektor peternakan harus dikelola menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi pasar dalam negeri dan luar negeri. Daya saing sub sektor peternakan, merupakan kemampuan dalam menghasilkan komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan baik nasional maupun internasional.

Setidaknya ada beberapa Langkah besar untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan di Indonesia, antara lain melalui : peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan peternak, pengembangan sector komplemen peternakan (agroindustri, penyediaan kredit pembiayaan usaha, asuransi ternak, pengembangan investasi, desiminasi teknologi tepat guna dan penyuluhan, penyediaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran), pengembangan standard mutu dan penerapan tata cara pengolahan hasil peternakan yang baik, sertifikasi dan ijin edar produk, perbaikan sistem logistik, pengembangan informasi, serta pengembangan pasar domestik dan internasional.

6. Menerapkan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menuju birokrasi professional dan modern.

Reformasi birokrasi akan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan dinamika perkembangan organisasi. Pengembangan reformasi birokrasi yang efektif dan profesional, baik dalam aspek sumber daya manusia, kelembagaan maupun tata kelola akan mendorong kinerja organisasi semakin lebih baik serta terwujudnya *good governance*.

Misi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan di atas, sudah relevan dengan misi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, yaitu mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian serta pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.

2.3. Tujuan dan Indikator Tujuan

Tujuan penting dari pembangunan Ditjen PKH selama 2020-2024 mencakup :

1. Tersedianya benih/bibit ternak dan peningkatan produksi ternak yang berkualitas dan berkelanjutan

Benih/bibit ternak merupakan komponen yang akan mempengaruhi dalam produksi ternak. Untuk itu kualitas, kuantitas dan kontinuitas penyediaan benih/bibit ternak berbasis sumberdaya lokal harus dapat diwujudkan secara bertahap dengan baik. Upaya penyediaan benih/bibit ternak terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya dengan melakukan pengembangan baik secara teknis maupun manajerial. Penerapan Good Breeding Practice (GBP) dan Good Farming Practice (GFP) pada peternak/kelompok peternak dan gabungan kelompok peternak diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas ternak, serta mendukung dalam peningkatan daya saing ekspor.

2. Tersedianya pakan berkualitas dan berkelanjutan

Pakan merupakan faktor penting didalam menghasilkan produk peternakan disamping bibit ternak. Penyediaan pakan yang berkualitas, aman, terjangkau dan berkelanjutan menjadi salah satu kunci dalam sistem produksi yang efisien dan berdaya saing. Optimalisasi penyediaan pakan berbasis bahan pakan lokal termasuk biomassa ikutan hasil tanaman dengan menggunakan teknologi yang adaptif dan modern sangat diperlukan menunjang peningkatan produksi.

3. Meningkatnya kesehatan hewan

Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui tindakan penanggulangan dan pengendalian yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Disamping itu kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luar yang bersifat *emerging* dan *reemerging diseases* melalui arus perdagangan ternak antar pulau, antar wilayah maupun antar negara. Keberhasilan dalam penanggulangan dan pengendalian diindikasikan dengan status kesehatan hewan disuatu wilayah (bebas, sporadik, endemik, dan wabah). Kegiatan seperti pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, bimbingan teknis dan pengawasan obat hewan adalah kegiatan yang terkait untuk meningkatkan status kesehatan hewan (*prevention better than cure*).

4. Terwujudnya kesehatan masyarakat veteriner nasional.

Penyelenggaraan Kesehatan masyarakat veteriner menjadi bagian penting untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH), pengendalian dan penanggulangan zoonosis serta penerapan kesejahteraan hewan. Pemenuhan persyaratan teknis kesmavet dan kesejahteraan hewan pada produk hewan menjadi faktor kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk hewan baik skala nasional maupun internasional.

Berdasarkan hasil kegiatan monitoring surveilans keamanan pangan produk hewan pada tahun 2020 telah dilakukan pengujian terhadap 18.900 sampel produk hewan, dengan hasil sebanyak 86,6% produk hewan yang telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan dari target 81,5%. Sampai dengan tahun 2020, terdapat 2.990 unit usaha produk hewan yang telah memiliki sertifikat NKV yang mengalami peningkatan sebanyak 357 unit usaha dibandingkan jumlah unit usaha berNKV tahun 2019 sebanyak 2.663 unit usaha.

Selain itu dalam upaya memenuhi persyaratan kesehatan produk hewan untuk ekspor, pada tahun 2020 telah dikeluarkan sebanyak 3.660 Sertifikat Veteriner yang meningkat 121 sertifikat dibandingkan tahun 2019 yang mengeluarkan 3.439 Sertifikat Veteriner. Peningkatan penerbitan sertifikat veteriner ini menunjukkan bahwa produk hewan asal Indonesia telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor dan berdaya saing.

Sehubungan dengan kegiatan pencegahan dan pengendalian zoonosis telah ditetapkan sasaran kegiatan berupa terkontrolnya kasus zoonosis pada manusia, khususnya penyakit AI, Rabies dan Antraks. Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia tahun 2020 sebanyak 76 kasus dari target 122 kasus, terdiri dari 40 kasus Rabies dan 36 kasus Antraks. Realisasi jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 46 kasus, dibandingkan tahun 2019 sebanyak 122 kasus.

5. Tersedianya produk peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing.

Produk peternakan bernilai tambah diperoleh dari upaya pengolahan, pemenuhan persyaratan standard dan sertifikasi produk sesuai kebutuhan pasar; termasuk didalamnya praktek peternakan organik. Sedangkan produk peternakan berdaya saing diperoleh dengan efisiensi produksi baik budidaya maupun pasca panen dan pengolahan, penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan, pemenuhan persyaratan standard dan sertifikasi, serta kemudahan konsumen untuk mendapatkan produk peternakan. Untuk itu, perencanaan produksi berdasarkan permintaan pasar, aspek distribusi dan pemasaran memegang peran yang sangat penting dalam peningkatan daya saing produk.

Selain untuk memenuhi pasar domestik dengan penyediaan produk peternakan yang berkualitas dan terjangkau dari aspek harga maupun ketersediaan di seluruh wilayah Indonesia, peningkatan ekspor juga merupakan prioritas pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Upaya yang dilakukan antara lain pengembangan produk berdaya saing sesuai kebutuhan pasar internasional, dan didukung dengan pengembangan pemasaran dan kerjasama internasional.

Beberapa upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas SDM, fasilitasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran, fasilitasi sertifikasi dan izin edar, pelayanan informasi pasar, serta peningkatan efisiensi produksi dengan fasilitasi pembiayaan untuk peningkatan skala usaha dan pengembangan kemitraan usaha.

6. Terwujudnya reformasi birokrasi Ditjen PKH.

Upaya untuk mewujudkan birokrasi yang berorientasi profesional pada pelayanan prima, terdapat perbaikan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yang menyangkut aspek manajemen perubahan, peraturan perundang undangan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan SDM, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik akan terus ditingkatkan. Sebagai organisasi publik, perbaikan dalam hal pelayanan yang tercermin dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan terus ditingkatkan.

Tujuan dan indikator tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan penjabaran rumusan visi dan misi organisasi tahun 2020-2024. Penjabaran tersebut dipetakan pada Tujuan dan Indikator tujuan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk peternakan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan	1. Meningkatkan ketersediaan benih/bibit dan produksi ternak yang berkualitas dan berkelanjutan	1. Tersedianya benih/bibit ternak berkualitas dan berkesinambungan	1. a. Jumlah benih/bibit ternak tersertifikasi yang tersedia (sertifikat) b. Jumlah produksi ternak (ekor)
	2. Meningkatkan ketersediaan, kualitas dan keamanan pakan secara berkelanjutan	2. Tersedianya pakan berkualitas, aman dan berkelanjutan	2. Indeks ketersediaan pakan berkualitas dan aman (indeks)
	3. Menyelenggarakan kesehatan hewan dalam meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat	3. Meningkatnya kesehatan hewan	3. Status Kesehatan Hewan (%)
Terwujudnya produk peternakan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan	4. Menyelenggarakan kesehatan masyarakat veteriner dalam meningkatkan daya saing produk hewan dan kesehatan masyarakat	4. Terwujudnya kesehatan masyarakat veteriner nasional	4- Jumlah unit usaha produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner (Unit Usaha)
			5. Jumlah produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner (Sertifikat Veteriner)
	5. Meningkatkan pengolahan, dan pemasaran produk peternakan berdaya saing	5. Tersedianya produk peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing	6. Jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan dari hewan ke manusia (kasus)
			4. Jumlah produk peternakan yang berhasil dihilirisasi (ton)
6. Menerapkan reformasi birokrasi Direktorat	6. Terwujudnya reformasi birokrasi Direktorat	5. Ekspor produk peternakan (US\$) Kuantitatif	
		6. Nilai RB Direktorat Jenderal Peternakan dan	

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
	Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menuju birokrasi profesional	Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai <i>roadmap</i> RB Kementan	Kesehatan Hewan (indeks)

Dari Tabel 2.1 terlihat bahwa visi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dan misi serta tujuannya merupakan mata rantai yang saling mendukung. Untuk mencapai visi dimaksud maka misi yang dibebankan kepada Ditjen PKH dan tujuan yang diinginkan beserta indikator tujuannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

2.4. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program (SP dan IKSP)

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dan memiliki 6 Sasaran Strategis, antara lain:

- i) SS 1: Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- ii) SS 2: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian
- iii) SS 3: Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian
- iv) SS 4: Meningkatnya Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Pertanian
- v) SS 5: Meningkatnya kualitas SDM dan Kelembagaan Petani
- vi) SS 6: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Terkelolanya Anggaran yang Akuntabel.

Ditjen PKH berdasarkan tugas dan kewenangannya memiliki 3(tiga) Sasaran Strategi yang dicapai melalui 3(tiga) program dari 5(lima) program Kementan. Sasaran strategi tersebut yaitu:

- i) SS 1: Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- ii) SS 2: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian
- iii) SS 5: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Terkelolanya Anggaran yang Akuntabel

Ditjen PKH awalnya memiliki Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat namun sesuai dengan restrukturisasi maka Ditjen PKH mendapat mandat 3 Program. Adapun berbagai program dan sasaran program tersebut adalah:

A. PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS, dengan sasaran program:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak.

Kinerja ketersediaan pangan strategis asal ternak dapat diukur dari capaian produksi daging yang terdiri dari komoditas: sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam dan itik. Selain pangan strategis, kinerja ketersediaan pangan asal ternak diukur juga dari capaian produksi telur dan susu. Target capaian produksi kurun waktu 2020-2024 dengan peningkatan produksi daging (1,28%); susu (0,85%), dan telur (2,16%) dan target produksi masing-masing komoditas setiap provinsi dapat dilihat pada Lampiran I. Dengan rata-rata pertumbuhan daging tersebut maka sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN baik target produksi dan kontribusi angka kecukupan protein hewani dapat tercapai

2. Meningkatnya pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan.

Kinerja keamanan pangan diukur berdasarkan persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan. Meningkatnya persentase keamanan dan mutu pangan merupakan sebuah indikasi bahwa pangan asal hewan yang diproduksi untuk masyarakat dapat dijamin aman, sehat, utuh dan halal bagi yang dipersyaratkan

3. Termanfaatkannya sarana pertanian sesuai dengan kebutuhan

Indikator kinerja sasaran program ini diukur dari tingkat kemanfaatan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan. Meningkatnya tingkat kemanfaatan sarana prasarana produksi peternakan dan kesehatan hewan diharapkan akan mendukung pencapaian kinerja produksi dan layanan lainnya

4. Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis.

Sasaran program ini indikatornya adalah persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis. Dengan indikator kinerja ini maka meningkat luas wilayah yang terbebas dari PHMS untuk mencapai sasaran strategisnya yaitu meningkatnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas

5. Meningkatnya luas wilayah yang terkendali kasus zoonosis

Indikator kinerja sasaran program ini adalah persentase wilayah yang terkendali zoonosis. Dengan indikator ini maka sasaran program yaitu meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari zoonosis dapat mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat

B. PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI, dengan sasaran program:

1. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian

Sasaran program ini indikator kinerjanya diukur dari pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan. Meningkatnya ekspor, merupakan indikasi kualitas produk peternakan dapat berdaya saing dan mengisi pangsa pasar luar negeri yang merupakan hasil seluruh kinerja fungsi peternakan dan kesehatan hewan yang sekaligus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional

2. Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian

Peluang penciptaan nilai tambah sektor pertanian terbesar ada pada agroindustri. Menciptakan nilai tambah dapat dilakukan melalui penguasaan teknologi. Sasaran program ini indikator kinerjanya diukur dari tingkat kemanfaatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

C. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN, dengan sasaran program

1. Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.

Indikator kinerja sasaran program diukur dari seberapa jauh nilai PMPRB Ditjen PKH. Pencapaian nilai RB dengan sasaran program mewujudkan birokrasi Ditjen PKH akan mencapai sasaran strategis berupa terwujudnya birokrasi Kementan.

2. Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Sasaran program terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas diukur dari indikator nilai kinerja anggaran. Nilai kinerja anggaran mencerminkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran di setiap satker yang secara agregat akan menggambarkan kinerja Dirjen PKH secara nasional. Pencapaian sasaran program dengan indikator kinerja anggaran Ditjen PKH, merupakan bagian dari kualitas dan akuntabilitas anggaran Kementan

Manual Indikator Sasaran Program dan Kegiatan akan disusun lebih lanjut dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Dokumen Renstra PKH tahun 2020-2024 (Revisi II).

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal bulan Maret 2020 dan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 mengakibatkan terhambatnya pergerakan barang dan jasa termasuk produk peternakan. Hal ini menyebabkan Ditjen PKH harus mengubah target indikator level I dan diselaraskan dengan Renstra Kementan yang direvisi pada Bulan November Tahun 2020. Indikator Kegiatan Sasaran Program (IKSP) yang berubah antara lain: a) produksi daging dengan narasi semula jumlah dengan satuan ton menjadi peningkatan produksi dengan satuan %; b) pertumbuhan volume ekspor dengan satuan ton berubah menjadi pertumbuhan nilai ekspor dengan satuan US\$; c) indeks ketersediaan sarana (indeks) menjadi tingkat kemanfaatan sarana peternakan (%). Perubahan peningkatan produksi daging, susu dan telur yang semula ribu ton menjadi persentase karena penyeragaman satuan untuk memudahkan pengukuran kinerja Kementerian Pertanian.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif di berbagai sektor ekonomi dan wilayah. Pembangunan nasional ini didukung oleh kekayaan sumberdaya alam, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi maju dan kelembagaan yang terkonsolidasi sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berkelanjutan

Dalam RPJMN 2020-2024, pembangunan sektor pertanian (termasuk sub sektor peternakan) diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan dengan agenda sebagai berikut:

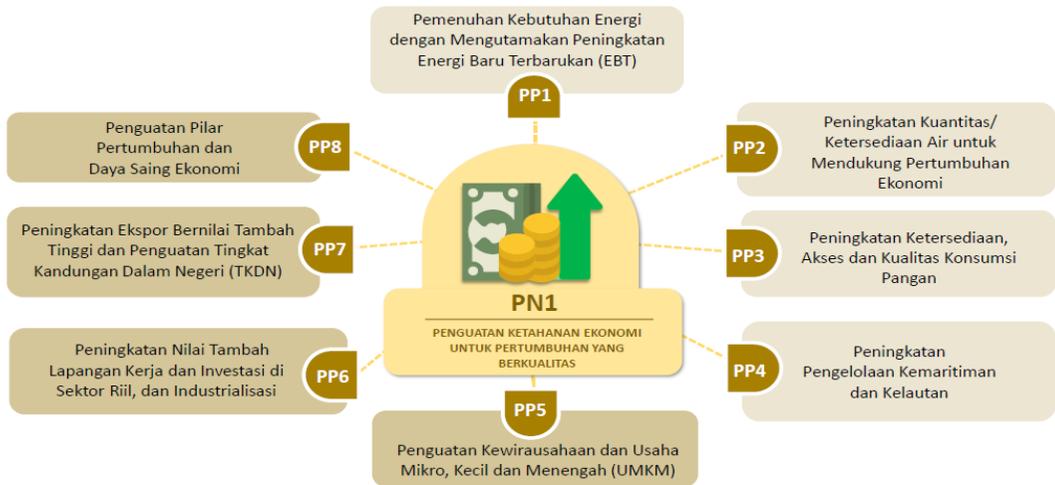
1. Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1).
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2).
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4).
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5).
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)

RPJMN Tahun 2020-2024, telah menetapkan Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yaitu proyek terintegrasi yang disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Major Project melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) dan masyarakat/Badan Usaha. Di dalam pendanaannya dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti subsidi, transfer ke daerah, masyarakat, BUMN dan pendanaan lainnya. Dari 41 Major Project di RPJMN, Kementerian Pertanian mendukung kepada tiga Project Major yaitu:

1. Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.
2. Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel*/Berbasis Kelapa Sawit
3. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.

Prioritas Nasional (PN) kemudian diterjemahkan menjadi 8 Program Prioritas, pada Gambar 3.1 sebagai berikut :



Gambar 3.1 Prioritas Nasional (PN1) dan Program Prioritasnya (PP)

Berdasarkan Gambar 3.1, Program Prioritas (PP) yang menjadi kontribusi penting Kementerian Pertanian, yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3) dan Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi (PP6). Ditjen PKH akan berkontribusi terhadap Prioritas Nasional 1 (PN 1) dengan Program Prioritas 3 (PP3) dan Program Prioritas 6 (PP6)

PN 1: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, dengan Program Prioritas (PP3): Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan secara nasional mempunyai indikator dan target sebagai berikut:

- a. Skor Pola Pangan Harapan tahun 2020 (90,4%) dan 2024 (95,2%)
- b. Angka kecukupan protein (AKP) sebesar 57 g/kapita/hari selama tahun 2020-2024.
- c. Produksi daging tahun 2020 (4,1 juta ton) dan 2024 (4,6 juta ton)
- d. Konsumsi daging (13,5 kg/perkapita/tahun) dan 2024 (14,7 kg/perkapita/tahun)
- e. Konsumsi protein asal ternak: 2020 (10,7 gram/kap/hari) dan 2024 (11,0 gram/kap/hari)
- f. Ketersediaan protein hewani: 2,5 juta ton (2020) dan 2,9 juta ton (2024)

Selain itu, kontribusi Ditjen PKH terhadap PN 1 juga menyangkut meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja dan ekspor dan daya saing perekonomian terkait dengan PP 6, yaitu Peningkatan nilai tambah dan investasi sektor riil dan industrialisasi. Indikator dan targetnya yaitu pertumbuhan PDB pertanian : 2020 (3,5%) dan 2024 (4,0-4,1%).

Kontribusi Ditjen PKH terhadap Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Indikator RPJMN (PP Ditjen PKH dan Kementerian Pertanian) disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) Keterkaitan Indikator RPJMN, Keterkaitan Kementan dan Keterkaitan Ditjen PKH

Program Prioritas (PP) / Kegiatan Prioritas (KP)	Program/ Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)
<p>PP3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan Skor Pola Pangan Harapan (90,4 - 95,2) Angka Kecukupan Protein (AKP) (57 gram/kapita/hari)</p>	<p>PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS</p>
<p>KP1. Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan Konsumsi daging (13,5 - 14,7 kg/kapita/tahun) Konsumsi protein asal ternak (10,7 - 11,04 gram/kap/hari)</p>	<p>SP 1. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi daging (%): 0,85 (2021) dan 1,28 (2024) 2. Peningkatan produksi susu (%): 0,55 (2021) dan 0,85 (2024) 3. Peningkatan produksi telur (%): 2,15 (2021) dan 2,16 (2024)
<p>KP2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan laut secara berkelanjutan Produksi Daging (4,1 - 4,6 juta ton) Ketersediaan protein hewani (2,5 - 2,9 juta ton)</p>	<p>SP2. Meningkatnya pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan (%): 85,2 (2021) dan 86 (2024)
<p>KP3. Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian Nilai Tukar Petani (103-105)</p>	<p>SP3. Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis(%): 80,5 (2021) dan 81 (2024)
<p>KP4. Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (Akses)</p>	<p>SP4. Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari zoonosis</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis(%): 74 (2021) dan 76 (2024)
<p>KP 5. Peningkatan tata nasional kelola sistem pangan <i>Global food security index</i> (64,1-69,8)</p>	<p>SP5. Termanfaatkannya sarana pertanian sesuai dengan kebutuhan</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan(%): 91,25 (2021) dan 94,5 (2024) <p>PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI</p> <p>SP6. Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian</p>

Program Prioritas (PP) / Kegiatan Prioritas (KP)	Program/ Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)
<p>PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sector riil dan industrialisasi</p> <p>Peningkatan industry pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir</p> <p>Pertumbuhan PDB pertanian (3,7-4,1 %)</p>	<p>1. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan(%): 87 (2021) dan 95 (2024)</p>
	<p>SP7. Meningkatnya Daya Saing komoditas pertanian</p> <p>2. Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan(%): 15 (2021) dan 30 (2024)</p>
	<p>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</p>
	<p>SP.8 Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima</p> <p>1. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan(nilai): 32,75 (2021) dan 35,5(2024)</p>
	<p>SP9. Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas</p> <p>2. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan(nilai): 88,68 (2021) dan 90,85(2024)</p>

Dari berbagai kontribusi Ditjen PKH baik terhadap prioritas nasional maupun terhadap program prioritas serta keterkaitannya dengan Kementerian Pertanian akan berperan untuk ketersediaan protein hewani, peningkatan produksi daging, keamanan pangan asal ternak, penerapan teknologi dan ekspor produk peternakan. Sedangkan untuk peningkatan kesejahteraan peternak terlihat dari pertumbuhan PDB peternakan dan nilai tukar petani.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Sebagai penjabaran arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2020-2024, dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, kebijakan Peternakan dan Kesehatan Hewan diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan peternak dan keberlanjutan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan. Dalam rangka mewujudkan : visi, misi,

tujuan dan sasaran pembangunan, maka Ditjen PKH menetapkan 4 (empat) arah kebijakan dan strategi, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan peternakan yang sesuai dengan *Good Breeding* dan *Good Farming Practises*.

Good Breeding Practises dan *Good Farming Practises* adalah pelaksanaan usaha peternakan dibidang pembibitan dan budidaya yang dilakukan secara baik mengikuti standar yang berlaku. *Good Breeding Practises* dan *Good Farming Practises* meliputi 4 (empat) aspek yaitu: sarana dan prasarana; proses produksi bibit dan ternak; pelestarian lingkungan; serta *monitoring*, evaluasi dan pelaporan.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Penyediaan benih/bibit dan peningkatan produksi ternak yang berkualitas dan berkelanjutan.
- b. Penyediaan pakan yang berkualitas, aman dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan bahan pakan lokal.
- c. Pengelolaan usaha peternakan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.

2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan dan kesehatan hewan

Penciptaan nilai tambah merupakan penambahan nilai produk baik dengan perbaikan proses budidaya seperti pada peternakan organik, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan maupun pada proses pemasaran. Peningkatan daya saing atau keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dapat dicapai melalui daya saing mutu dan daya saing harga yang diperoleh sebagai dampak efisiensi usaha, dan didukung dengan peningkatan akses pasar.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Peningkatan nilai tambah produk peternakan melalui pengolahan hasil peternakan dan pengembangan peternakan organik.

- b. Peningkatan daya saing produk peternakan melalui pengembangan investasi, kemitraan, kelembagaan peternak, fasilitasi prasarana dan sarana pemasaran hasil peternakan, promosi peternakan dan kesehatan hewan, pengembangan pemasaran dalam dan luar negeri serta pengembangan system pengolahan dan pemasaran hasil peternakan

3. Pengelolaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

Pengelolaan kesehatan hewan bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan kesehatan hewan agar terbebas dari penyakit hewan. Pengelolaan kesehatan hewan meliputi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; pengelolaan obat hewan serta alat dan mesin kesehatan hewan. Pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit asal hewan. Pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner meliputi: pengendalian dan penanggulangan zoonosis; penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan; penjaminan higiene dan sanitasi; pengembangan kedokteran dan perbandingan; serta penanganan bencana yang berdampak pada hewan.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Meningkatkan kesehatan hewan.
- b. Meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner.

4. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan muara dari implementasi Reformasi Birokrasi. Implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan berdasarkan *road map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Berdasarkan *road map* Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) terdapat 8 (delapan) area perubahan dalam implementasi Reformasi Birokrasi, meliputi: area perubahan mental aparatur, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas, area penguatan kelembagaan, area penataan tatalaksana, area penataan sumber daya manusia aparatur sipil

negara, area penataan peraturan perundang-undangan, dan area peningkatan kualitas layanan publik.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui: Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Arah kebijakan Kementerian Pertanian yang berkaitan langsung dengan rumusan kebijakan Ditjen PKH yaitu terjaganya ketahanan pangan nasional, meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian, dan terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima

Dikaitkan dengan arah kebijakan dan strategi Kementan maka posisi Ditjen PKH dapat dijelaskan pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3. 2 Kaitan antara Arah Kebijakan dan Strategi Kementan dan Ditjen PKH

No	Arah kebijakan dan Strategi Kementan	Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PKH
1	<p>Terjaganya ketahanan pangan nasional.</p> <p>Strategi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi, produktivitas sektor pertanian; 2. Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional; 3. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan; 	<p>Penyelenggaraan peternakan yang sesuai dengan Good Breeding dan Good Farming Practises. Strategi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan benih/bibit dan peningkatan produksi ternak yang berkualitas dan berkelanjutan. 2. Penyediaan pakan yang berkualitas, aman dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan bahan pakan lokal.

No	Arah kebijakan dan Strategi Kementan	Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PKH
		<p>3. Pengelolaan usaha peternakan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.</p> <p>Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.</p> <p>Strategi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesehatan hewan 2. Meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner.
2	<p>Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian. Strategi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan nilai tambah 2. Peningkatan daya saing pertanian 	<p>Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas peternakan.</p> <p>Strategi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan dan pengembangan pemasaran produk peternakan dan kesehatan hewan yang berkualitas dan berdaya saing. 2. Peningkatan kelembagaan, usaha dan investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan
3	<p>Terwujudnya birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima.</p> <p>Strategi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan implemementasi manajemen ASN 2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis 3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja 4. Transformasi pelayanan publik 	<p>Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Strategi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam

No	Arah kebijakan dan Strategi Kementan	Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PKH
		mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Dari Tabel 3.2 nampak bahwa arah kebijakan dan strategi Ditjen PKH mendukung dan sebagai bagian dari arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian. Ada 4 arah kebijakan dengan 9 strategi Ditjen PKH sebagai landasan dalam pembangunan Tahun 2020-2024.

3.2. Dukungan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Proyek Prioritas Nasional dan Pengarusutamaan

3.2.1. Pengembangan Korporasi

Korporasi peternak dibangun melalui pemberdayaan peternak dengan mengkonsolidasikan peternak dalam suatu kelembagaan petani/peternak (kelompok/gabungan kelompok tani) yang didorong untuk bertransformasi menjadi sebuah kelembagaan ekonomi. Kelembagaan Ekonomi Petani/Peternak (KEP) diharapkan meningkatkan skala usaha petani/peternak karena tergabung dalam kelompok yang lebih besar, menjalankan usaha dengan manajemen yang profesional, meningkatkan aksesibilitas permodalan dan infrastruktur, jangkauan pasar, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan daya saing komoditas peternakan.

Amanah RPJMN 2020-2024 menyatakan bahwa salah satu Proyek Nasional (Major Project) untuk sektor pangan adalah Jaminan Usaha serta Korporasi Petani/Peternak, kegiatan ini akan dikembangkan di 1.029 klaster komoditas pertanian (termasuk peternak) dengan jumlah korporasi petani/nelayan dengan target sebanyak 350 unit dan untuk peternakan ditargetkan sebanyak 60 unit korporasi. Inti dari pengembangan korporasi petani dilakukan melalui penguatan kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum yang mampu menciptakan unit usaha bisnis pertanian secara

mandiri maupun bermitra dengan badan usaha lainnya dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing untuk mewujudkan kesejahteraan petani.

Pengembangan korporasi peternak dilakukan melalui pendekatan kawasan. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai upaya mengembangkan pertanian pada lokasi yang memenuhi persyaratan agroekologis, memenuhi kelayakan agroekonomi dan agro-sosio-teknologi, aksesibilitas lokasi memadai, dan *diseconomic-externality* yang ditimbulkannya dapat dikendalikan. Pengembangan kawasan pada hakekatnya terdiri atas melakukan pemetaan, evaluasi potensi lahan dan sentra-sentra produksi peternakan. Pengembangan kawasan komoditas peternakan dilakukan berdasarkan Kepmentan Nomor 472 Tahun 2018 tentang lokasi kawasan pertanian nasional yang diantaranya menetapkan kawasan komoditas prioritas peternakan di seluruh kabupaten.

Salah satu upaya mengatasi ketergantungan impor daging sapi tersebut diperlukan penguatan dari berbagai aspek antara lain: (i) aspek kelembagaan dan skala usaha, saat ini kondisi peternakan sapi potong di Indonesia merupakan usaha sampingan/subsisten; (ii) aspek teknis pengembangan ternak melalui peningkatan produktivitas dan populasi; (iii) aspek pakan, diperlukan optimalisasi pemanfaatan bahan pakan lokal secara efisien dan berkelanjutan; (iv) aspek kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan serta peningkatan pelayanan kesehatan hewan; (v) aspek keamanan dan mutu produk hewan melalui penjaminan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi yang dipersyaratkan.

Dalam rangka mengakselerasikan kegiatan peningkatan populasi ternak tahun 2020-2024, Kementerian Pertanian merancang kegiatan pengembangan desa korporasi sapi. Strategi dalam pengembangan desa korporasi sapi, yaitu: (a) Optimalisasi pemanfaatan padang penggembalaan, biomassa dan hasil samping pertanian untuk pakan; (b) Penguatan infrastruktur untuk peternakan; (c) Penguatan Rantai Pasok ternak, hasil ternak (Logistik, Distribusi, Pemasaran); (d) pengolahan limbah (pupuk cair, padat dan biogas); dan (e) Regulasi dan Deregulasi. Strategi tersebut kemudian didukung dengan beberapa kegiatan yaitu (i) Pembiakan pola semi intensif/ekstensif; (ii) Pengembangan kemitraan usaha hasil budidaya; (iii) Penyediaan Infrastruktur berbasis teknologi

dalam pemenuhan kebutuhan: pakan, reproduksi, kesehatan hewan, pengolahan hasil ternak baik pangan maupun non pangan, air, kandang, pasca panen (RPH dan *coldstorage*), dan kegiatan pemasaran; (iv) Pembiayaan: Perbankan, BUMN, PMDN, PMA, Asuransi Ternak.

3.2.2. Dampak Perubahan Iklim (DPI)

Pemanasan global memberi dampak terhadap perubahan iklim, hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatkan temperatur bumi dalam 50 tahun terakhir ini. Laporan *Interpanel Governmental for Climate Change* (IPCC) menyatakan bahwa pada tahun 2100 diperkirakan temperatur permukaan bumi meningkat antara 0.4 – 4.8 °C. Perubahan iklim akan berdampak terhadap manusia dan apa yang dibudidayakan oleh manusia. Sektor pertanian, termasuk peternakan, merupakan sektor yang akan mengalami dampak perubahan iklim yang cukup besar. Pada sisi lain, dari perspektif kontribusi perekonomian nasional, sektor pertanian termasuk di dalamnya peternakan, memiliki kontribusi yang tinggi bagi perekonomian nasional.

Perubahan iklim memiliki pengaruh pada sektor peternakan secara langsung maupun tidak langsung. Dampak perubahan iklim terhadap peternakan adalah diakibatkan oleh kenaikan temperatur, peningkatan konsentrasi karbondioksida dan perubahan curah hujan. Hal ini akan berdampak pada : (i) produksi tanaman pakan; (ii) ketersediaan air; (iii) penyakit; (iv) produktivitas ternak; (v) reproduksi, dan vi) *biodiversity*.

Peningkatan konsentrasi CO₂ di atmosfer menyebabkan pertumbuhan, kualitas dan produktivitas tanaman pakan menurun, menyebabkan penurunan biodiversitas tanaman pakan sehingga terjadi kelangkaan pakan ternak. Kekurangan ketersediaan air yang disebabkan perubahan curah hujan akan berdampak langsung terhadap produksi ternak, karena air sangat penting bagi ternak dan juga bagi pertumbuhan pakan ternak.

Perubahan iklim global akan berpengaruh terhadap kesehatan hewan, peningkatan temperatur juga memudahkan perkembangan mikroorganisme patogen dan parasit, sehingga ternak lebih rentan terhadap serangan penyakit dan bahkan menyebabkan kematian. Dampak yang paling merugikan

adalah terjadinya penurunan produktivitas, hal ini disebabkan oleh cekaman panas (*heat stress*) yang secara langsung akan menyebabkan penurunan konsumsi, gangguan metabolisme dan utilisasi nutrisi. Cekaman pakan juga akan berdampak pada penurunan efisiensi reproduksi ternak. Dalam jangka panjang perubahan iklim global akan berdampak pada berkurangnya keragaman genetik, baik pada tanaman pakan maupun keragaman ternak.

Tantangan ke depan untuk menyikapi dampak perubahan iklim global dalam mewujudkan peternakan yang tangguh maka perlu dukungan semua pihak baik pemerintah, perguruan tinggi, badan penelitian, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat itu sendiri untuk secara bersama-sama menyusun strategi dan rencana aksi adaptasi sektor peternakan secara koordinatif, integratif, sinkron dan sinergi baik di tingkat nasional maupun lokal antara lain melalui upaya penggunaan teknologi mitigasi dan adaptasi serta meningkatkan sosialisasi pemahaman kemampuan petugas lapangan dan petani/peternak dalam mendeteksi bergesernya iklim.

Teknologi mitigasi dan adaptasi untuk perbaikan lingkungan dalam kegiatan peternakan antara lain melalui : pengolahan dan pemanfaatan kotoran ternak menjadi biogas, pembuatan pupuk kompos, pupuk organik serta pupuk cair; penanaman hijauan pakan ternak, perbaikan padang penggembalan, integrasi ternak-tanaman.

3.2.3. Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/ *Food Estate*

Kawasan Sentra Produksi Pangan (*Food Estate*) merupakan usaha pertanian (agribisnis) yang dikelola dengan pendekatan korporasi petani, dan terintegrasi hulu-hilir yang dapat menjamin kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pasar.

Food Estate dikembangkan berbasis korporasi, sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi peternak dengan mengintegrasikan usaha mulai dari hulu sampai hilir, yaitu dari pembibitan, budidaya, pasca panen, dan pemasaran. Pemerintah saat ini sedang giat mengembangkan kawasan *Food Estate* di Kalimantan Tengah melalui integrasi komoditas utama padi dan jagung dengan komoditas hortikultura, perkebunan, peternakan, sebagai pendukung di dalam satu kawasan.

Dukungan peternakan untuk kegiatan *Food Estate* dilaksanakan melalui pengembangan ternak itik dan fasilitasi sarana prasarana pengolahan hasil.

3.2.4. Pengembangan Sarang Burung Walet

Kementerian Pertanian telah merumuskan pendekatan strategi dalam melaksanakan program/kegiatan untuk menjamin ketersediaan pangan dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam kondisi pandemi, yang dirumuskan dalam lima Cara Bertindak (CB) dan salah satunya Gerakan tiga kali ekspor (Grati eks). Kegiatan terobosan Ditjen PKH yang mendukung grati eks adalah Pengembangan Seribu (1000) Desa Sarang Burung Walet. Keputusan Menteri Pertanian tahun 104 tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian menjadi binaan teknis Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Prioritas Nasional untuk mendukung kinerja ekspor kegiatan Pilot Project Sarang Burung Walet (SBW). Langkah-langkah strategis pengembangan ekspor SBW antara lain:

- a. Penataan regulasi dan penguatan database;
- b. Penguatan diplomasi dengan negara Tiongkok (China) dan negara lain untuk peningkatan volume ekspor dengan melibatkan K/L terkait;
- c. Optimalisasi produksi, penjaminan keamanan dan mutu sarang burung walet;
- d. Promosi dan pengembangan pemasaran dalam negeri dan ekspor;
- e. Pengolahan dan diversifikasi produk;
- f. Fasilitasi pengembangan usaha dan pengaturan investasi

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung strategi tersebut antara lain:

- a. Restorasi dan pengembangan rumah walet di daerah potensi
- b. Penambahan dan penumbuhan rumah pencucian berbasis klaster
- c. Pendampingan jaminan keamanan pangan dan mutu dengan menerapkan *good practices unit*
- d. Fasilitasi pembiayaan skema khusus
- e. Peningkatan kualitas SDM teknis dan pelaku usaha sarang burung walet

3.2.5. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Ditjen PKH juga mendukung pengarusutamaan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung. Salah satu pengarusutamaan tersebut adalah Pengarusutamaan Gender (PUG). Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, serta memanfaatkan sumber daya atau sumber modal dari hasil pembangunan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.

3.3. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

3.3.1. Kerangka Regulasi

Aspek regulasi dimaksudkan sebagai kebutuhan regulasi yang harus diadakan selama kurun waktu 2020-2024. Kebutuhan ini dapat berupa penambahan regulasi ataupun penyederhanaan dan penghapusan untuk menjalankan penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Berdasarkan definisi diatas maka perencanaan regulasi dapat mempengaruhi implementasi arah kebijakan dan strategi dalam mencapai tujuan akhir organisasi. Berdasarkan hasil identifikasi, berikut ini kerangka regulasi yang diperlukan untuk Ditjen PKH sebagai berikut:

Tabel 3.3 Arah Kerangka Regulasi/Kebutuhan Regulasi dan Urgensi Kerangka Regulasi

Arah kerangka regulasi dan/ atau kebutuhan regulasi		Urgensi kerangka regulasi	Keterangan
1. Rancangan Permentan tentang Pemasukan dan Pengeluaran Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan			
1	Permentan No. 13/2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan		Arahan Presiden tentang penyederhanaan regulasi. Penyederhanaan dari beberapa regulasi
2	Permentan No. 57/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan		
3	Permentan No. 127/2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak		
4	Permentan No. 51/2011 tentang Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak (semen beku/embrio, ternak potong, ternak perah, unggas dan aneka ternak)		
2. Rancangan Permentan tentang Pengawasan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan			
1	Permentan No. 74/2007 tentang Pengawasan Obat Hewan		Arahan Presiden tentang penyederhanaan regulasi. Penyederhanaan dari beberapa regulasi
2	Permentan No. 65/2008 tentang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan		
3	Permentan No. 42/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak		
4	Permentan No. 14/2008 tentang Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan		
5	Permentan No. 15/2008 tentang Monitoring dan Surveilans, Residu dan Cemar Mikroba pada Hewan		
6	Permentan No. 45/2007 tentang Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar		
7	Permentan No. 35/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif		
3. Rancangan Permentan tentang Standar dan Sertifikasi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan			
1	Kepmentan No. 240/2003 tentang Cara Pembuatan Pakan yang Baik		Arahan Presiden tentang penyederhanaan regulasi. Penyederhanaan dari beberapa regulasi:
2	Kepmentan No. 446/1999 tentang Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik		
3	Permentan No. 114/2014 tentang Pematangan Hewan Kurban		
4	Permentan No. 45 tahun 2007 tentang Klasifikasi Laboratorium		

Arah kerangka regulasi dan/ atau kebutuhan regulasi		Urgensi kerangka regulasi	Keterangan
5	Permentan No. 13/2010 tentang RPH Ruminansia dan Meet Cutting Plan		
6	Permentan No. 38/2015 tentang Tata Cara Produksi Kopi Luwak yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan		
7	Permentan No. 19/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih/Bibit Ternak dan SDGH		
8	Permentan No. 22/2017 tentang Pendaftaran Pakan		
9	Kepmentan No. 695/1996 tentang Pendaftaran Obat Hewan jo. Kepmentan 455/2000 tentang Perubahan Obat Hewan		
4. Rancangan Permentan tentang Izin Usaha dan Pendaftaran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan			
1	Kepmentan No. 4040/2002 tentang Izin Usaha dan Pendaftaran Peternakan		Arahan Presiden tentang penyederhanaan regulasi . Penyederhanaan dari beberapa regulasi:
2	Permentan No. 18/2009 tentang Izin Usaha Obat Hewan		
5. Rancangan Permentan tentang Nilai Tambah dan Daya Saing bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan			
1	Perubahan substansi perijinan dan skala usaha yang ada pembaharuan; penambahan substansi pengolahan hasil peternakan, pemasaran hasil peternakan, dan pengembangan usaha peternakan. Merupakan pengganti dari: Permentan No. 14/2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan		Penambahan substansi
2	Rancangan Permentan tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Pengurangan Pajak pada Penanaman Modal Bidang Usaha Peternakan. Merupakan tindak lanjut dari amanat: PP No. 78/2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu		Permentan baru
6. Rancangan Permentan tentang Penyediaan dan Peredaran Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan			
1	Penambahan substansi: penyediaan, peredaran ternak dan produk hewan; penyediaan dan peredaran obat hewan; penyediaan dan peredaran pakan; penyediaan dan peredaran susu		Penambahan substansi
7. Rancangan Permentan Program Kegiatan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan			

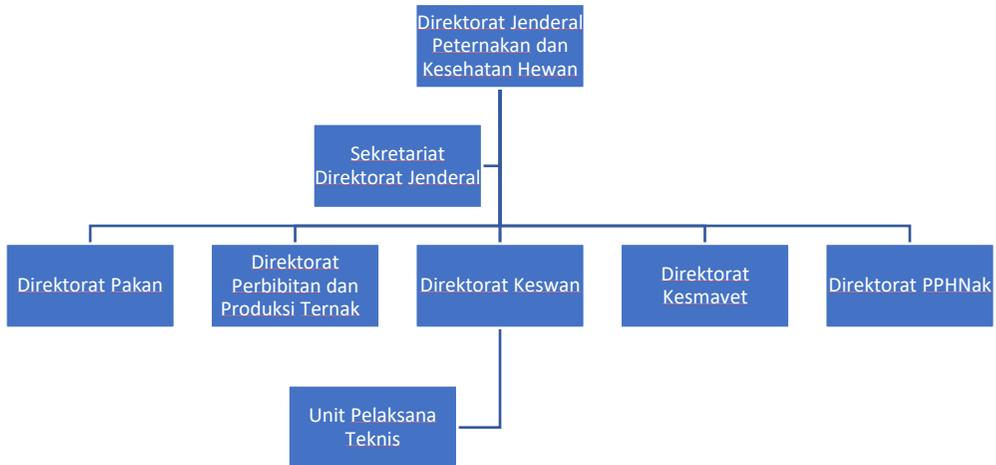
Arah kerangka regulasi dan/ atau kebutuhan regulasi		Urgensi kerangka regulasi	Keterangan
1	Permentan Bekerja (Permentan No. 14/2019)		Arahan Presiden tentang penyederhanaan regulasi . Penyederhanaan dari beberapa regulasi:
2	Permentan No. 48 tahun 2016 tentang UPSUS SIWAB		
3	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat		

Berdasarkan Tabel 3.3 terdapat 7 rancangan regulasi yang akan disederhanakan maupun penambahan substansi. Ketujuh regulasi tersebut dibuat untuk menyederhanakan 27 regulasi yang ada saat ini dalam rangka bagian dari penataan peraturan perundang-undangan dan adanya arahan Presiden.

3.3.2. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian/ lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara), yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan, maka kelembagaan diarahkan mendukung pencapaian agenda pembangunan yaitu meningkatnya pemantapan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing serta terwujudnya reformasi birokrasi.

Organisasi Ditjen PKH sesuai dengan prinsip *Structure Follow The Strategy* memerlukan kerangka kelembagaan yang menyesuaikan perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, tata laksana yang baik diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM termasuk didalamnya. Oleh karena itu, optimalisasi tugas dan fungsi organisasi sangat dibutuhkan untuk mengakomodir pencapaian sasaran strategis Ditjen PKH tahun 2020 – 2024.



Gambar 3.2. Kerangka Kelembagaan Ditjen PKH

Dari Gambar 3.2 Ditjen PKH didukung oleh 6 unit kerja setingkat eselon II. Sebanyak 5 (lima) unit kerja menjalankan fungsi teknis, meliputi 1) Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; 2) Direktorat Pakan; 3) Direktorat Kesehatan Hewan; 4) Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner; serta 5) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan. Sementara fungsi manajerial diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal.

Dalam pelaksanaan kegiatan mendukung tugas pokok dan fungsi Ditjen PKH didukung oleh 23 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mendukung fungsi perbibitan dan produksi ternak, penanganan dan pengendalian kesehatan hewan, serta yang menangani pengujian produk peternakan dan kesehatan hewan yaitu 1) Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturraden; 2) BPTU-HPT Indrapuri; 3) BPTU-HPT Siborongborong; 4) BPTU-HPT Padang Mangatas; 5) BPTU-HPT Sembawa; 6) BPTU-HPT Pelaihari; 7) BPTU-HPT Denpasar; 8) Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari; 9) Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang; 10) Balai Embrio Ternak (BET)

Cipelang; 11) Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates; 12) Balai Besar Veteriner (BBVet) Maros; 13) Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar; 14) Balai Veteriner (Bvet) Medan; 15) Balai Veteriner (Bvet) Bukittinggi; 16) Balai Veteriner (Bvet) Lampung; 17) Balai Veteriner (Bvet) Subang; 18) Balai Veteriner (Bvet) Banjarbaru; 19) Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya; 20) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) Gunung Sindur; 21) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor; 22) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) Bekasi; 23) Loka Veteriner Jayapura.

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Ditjen PKH juga telah mengakselerasi penguatan sumber daya aparatur. Menindaklanjuti mandat Presiden RI dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019 – 2024 terkait dengan dengan penyederhanaan organisasi dimana jabatan struktural (administrator, pengawas dan pelaksana) telah dilakukan transformasi jabatan struktural (level eselon 3 dan 4) menjadi jabatan fungsional yang menghargai keahlian, dan kompetensi pada akhir tahun 2020.

Penyederhanaan birokrasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, agile, dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Hal ini diikuti dengan upaya peningkatan kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Arahan Presiden tersebut mengisyaratkan perlunya tindak lanjut yang bersifat konkret dengan cara mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas Administrator (jabatan struktural Eselon III), Pengawas (jabatan struktural Eselon IV), dan Pelaksana (jabatan struktural Eselon V) di seluruh Kementerian, Lembaga yang pimpinannya setingkat Menteri, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga Non Struktural, Lembaga Penyiaran Publik, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara selektif. Terhadap pejabat struktural Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V yang terdampak pengalihan akibat dari kebijakan penyederhanaan birokrasi tersebut dialihkan menjadi pejabat fungsional yang sesuai dengan bidang dan tugas

jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan .

Menindak lanjuti hal tersebut, Menteri Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang mengakomodir transformasi jabatan lingkup Kementerian Pertanian.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Kerangka kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan pertanian, serta kerangka kebijakan dan strategi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, atas pertimbangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam menjalankan Tugas dan Fungsi, maka Ditjen PKH mendapatkan 4 (empat) mandat sasaran strategis sebagai bagian dari arah pencapaian target kinerja untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

Arah kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan pertanian pada tahun 2020-2024 memerlukan penetapan target kinerja sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan pendanaan yang memadai untuk menjalankan kebijakan, strategi program dan kegiatan prioritas telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam menjalankan arah kebijakan nasional, karena penentuan target kinerja telah mempertimbangkan adanya sumber dana baik dari APBN, APBD dan berbagai sumber dana lainnya.

4.1. Target Kinerja

Sehubungan dengan adanya Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) tahun 2020 maka program Ditjen PKH yang semula terakomodir dalam 1 program menjadi 3 Program dengan 11 indikator kinerja sasaran program, sebagai barometer capaian kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan periode 2020 – 2024. Target kinerja merupakan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran program Ditjen PKH. Setiap capaian indikator yang merepresentasikan tercapainya satu sasaran memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuan organisasi, sebagai tolak ukur pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dimana target kinerja Ditjen PKH merupakan hasil pendelegasian indikator kinerja Kementerian Pertanian.

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka fasilitasi pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, serta pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam sasaran program, diperlukan kerangka pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang profesional, alokasi dan distribusi dana secara tepat sasaran dan penggunaan dana yang efektif dan efisien.

Alokasi pendanaan untuk penyelenggaraan kegiatan Ditjen PKH dapat berasal dari Pemerintah (APBN : RM, BLU, PNPB, SBSN), dan sumber pendanaan lainnya yang berasal dari Pemerintah Daerah (APBD), Swasta, BUMN/BUMD, investasi dalam negeri (PMDN), investasi dari luar negeri (PMA), Lembaga Keuangan dan Perbankan dan Swadaya Masyarakat. Proporsi APBN dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan merupakan pengungkit sumber pendanaan lainnya dalam mendukung target pembangunan nasional. Selama kurun waktu tahun 2020-2024 kerangka pendanaan tersebut disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Indikasi Kebutuhan Pendanaan APBN Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan

No	Program/ Kegiatan	Alokasi (Juta Rp)			
		2021	2022	2023	2024
	KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI BERKUALITAS PANGAN	1.325.051	1.756.502	1.844.328	1.936.544
1	Peningkatan Produksi Pakan ternak	113.338	121.958	128.056	134.459
2	Pengendalian dan Penanggulangan penyakit hewan	152.959	229.549	241.026	253.077
3	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	1.009.794	1.341.734	1.408.821	1.479.262

4	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	48.959	63.261	66.425	69.746
PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI		19.373	26.123	27.429	28.801
5	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	19.373	26.123	27.429	28.801
DUKUNGAN MANAJEMEN		272.531	310.442	325.964	342.262
6	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan	272.531	310.442	325.964	342.262
TOTAL		1.616.956	2.093.067	2.197.721	2.307.607

Pada tabel 4.1 terlihat bahwa dana untuk penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak memegang porsi yang cukup besar diantara kegiatan-kegiatan program lainnya di Ditjen PKH.

Alokasi pendanaan tahun 2021 sesuai dengan alokasi yang tertuang dalam DIPA, pendanaan tahun 2022 sesuai pagu alokasi sedangkan pendanaan untuk tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bersifat perkiraan kebutuhan dan akan disesuaikan dengan besaran alokasi dana yang diperoleh dan pilihan prioritas kegiatan dalam mendukung sasaran program serta evaluasi program pada tahun sebelumnya. Pendanaan tersebut untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan penting penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

Rencana Kerja Tahunan pelaksanaan Program dan Kegiatan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada Lampiran 2.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Ditjen PKH Tahun 2020-2024 (Revisi 2) merupakan dokumen perencanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan selama 5 tahun dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN tahun 2020-2024 serta Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 (Revisi 2) terkait Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan, strategi dan program sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja atas indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab setiap unit kerja dalam mendukung kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

Diharapkan dokumen Renstra ini, menjadi acuan utama bagi penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan baik di pusat maupun daerah sehingga terwujud suatu sinergi kegiatan antara pusat dan daerah. Sinergi horisontal dan vertikal, baik di lingkungan Ditjen PKH, dengan Eselon I lingkup Kementan, dan Pemangku Kepentingan lainnya (Pemda, Masyarakat dan Swasta) sangat diperlukan untuk mewujudkan visi : ***“Terwujudnya peternakan indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern.***

Penyusunan Renstra telah disusun sesuai Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2019, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 dan apabila diperlukan adanya perubahan Renstra Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

PROYEKSI POPULASI SAPI POTONG TAHUN 2020-2024 (EKOR)

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	416.463	432.163	472.262	492.601	515.149
2	Sumatera Utara	899.093	932.988	975.785	1.017.810	1.064.398
3	Sumatera Barat	418.375	434.148	450.652	470.061	491.577
4	Riau	203.301	210.965	221.753	231.304	241.891
5	Jambi	161.895	167.998	172.280	179.700	187.925
6	Sumatera Selatan	305.799	317.327	326.974	341.057	356.668
7	Bengkulu	165.312	171.544	167.487	174.700	182.696
8	Lampung	867.002	899.688	876.916	914.683	956.550
9	Kepulauan Bangka Belitung	15.793	16.388	17.096	17.833	18.649
10	Kepulauan Riau	27.462	28.498	30.218	31.520	32.962
11	DKI Jakarta	2.404	2.494	1.867	1.947	2.036
12	Jawa Barat	390.507	405.229	425.851	444.192	464.524
13	Jawa Tengah	1.806.474	1.874.577	1.991.244	2.077.002	2.172.072
14	DI. Yogyakarta	307.487	319.079	335.460	349.908	365.924
15	Jawa Timur	4.830.872	5.012.994	5.232.669	5.458.029	5.707.857
16	Banten	49.655	51.527	45.449	47.406	49.576
17	Bali	590.452	612.711	596.977	622.688	651.190
18	Nusa Tenggara Barat	1.288.795	1.337.382	1.394.678	1.454.743	1.521.331
19	Nusa Tenggara Timur	1.192.820	1.237.788	1.275.978	1.330.931	1.391.851
20	Kalimantan Barat	156.453	162.352	171.592	178.982	187.175
21	Kalimantan Tengah	77.682	80.610	94.517	98.588	103.101

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
22	Kalimantan Selatan	131.569	136.529	160.567	167.482	175.149
23	Kalimantan Timur	123.466	128.121	130.139	135.743	141.957
24	Kalimantan Utara	23.872	24.772	24.271	25.316	26.475
25	Sulawesi Utara	129.069	133.935	138.969	144.954	151.589
26	Sulawesi Tengah	392.681	407.485	436.266	455.055	475.884
27	Sulawesi Selatan	1.436.153	1.490.296	1.524.302	1.589.950	1.662.727
28	Sulawesi Tenggara	358.239	371.744	392.201	409.092	427.817
29	Gorontalo	254.780	264.385	276.586	288.498	301.703
30	Sulawesi Barat	113.026	117.287	122.986	128.283	134.154
31	Maluku	110.418	114.581	120.167	125.342	131.079
32	Maluku Utara	107.286	111.331	120.193	125.369	131.108
33	Papua Barat	56.549	58.681	66.618	69.487	72.668
34	Papua	111.964	116.185	127.019	132.489	138.554
Nasional		17.523.168	18.183.783	18.917.988	19.732.745	20.635.965

PROYEKSI POPULASI SAPI PERAH TAHUN 2020-2024 (EKOR)

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	22	23	20	21	21
2	Sumatera Utara	5.755	5.880	5.259	5.398	5.553
3	Sumatera Barat	705	720	797	818	842
4	Riau	101	104	89	92	94
5	Jambi	27	28	19	20	20
6	Sumatera Selatan	58	59	61	62	64
7	Bengkulu	335	342	300	308	317
8	Lampung	1.034	1.057	1.084	1.113	1.145
9	Kepulauan Bangka Belitung	184	188	167	171	176
10	Kepulauan Riau	5	5	6	7	7
11	DKI Jakarta	2.053	2.097	2.180	2.237	2.302
12	Jawa Barat	119.884	122.492	125.740	129.069	132.792
13	Jawa Tengah	141.579	144.659	150.117	154.092	158.536
14	DI. Yogyakarta	3.587	3.665	3.737	3.836	3.947
15	Jawa Timur	299.315	305.826	311.664	319.916	329.144
16	Banten	63	64	71	73	75
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	6	7	7
19	Nusa Tenggara Timur	33	34	32	33	34
20	Kalimantan Barat	37	37	177	182	187
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
22	Kalimantan Selatan	198	202	107	110	113
23	Kalimantan Timur	93	95	92	95	98
24	Kalimantan Utara	2	2	3	3	3
25	Sulawesi Utara	71	73	56	58	59
26	Sulawesi Tengah	10	10	7	8	8
27	Sulawesi Selatan	1.081	1.105	1.169	1.200	1.234
28	Sulawesi Tenggara	44	45	54	56	57
29	Gorontalo	5	5	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	20	21	21	22	22
Nasional		576.301	588.838	603.038	619.004	636.859

PROYEKSI POPULASI KERBAU TAHUN 2020-2024 (EKOR)

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	86.644	87.572	105.413	107.044	108.956
2	Sumatera Utara	101.156	102.240	98.666	100.192	101.982
3	Sumatera Barat	82.958	83.846	86.511	87.850	89.419
4	Riau	26.731	27.017	29.745	30.206	30.745
5	Jambi	44.149	44.622	46.720	47.442	48.290
6	Sumatera Selatan	28.829	29.138	30.387	30.857	31.408
7	Bengkulu	30.755	31.085	29.406	29.861	30.395
8	Lampung	18.250	18.446	20.360	20.675	21.044
9	Kepulauan Bangka Belitung	351	355	303	308	314
10	Kepulauan Riau	8	8	6	6	6
11	DKI Jakarta	82	83	39	39	40
12	Jawa Barat	83.397	84.291	82.573	83.850	85.348
13	Jawa Tengah	59.324	59.960	59.841	60.767	61.852
14	DI. Yogyakarta	497	502	495	503	512
15	Jawa Timur	23.345	23.595	23.317	23.678	24.101
16	Banten	57.230	57.843	60.173	61.104	62.195
17	Bali	1.333	1.347	1.411	1.433	1.458
18	Nusa Tenggara Barat	121.900	123.206	116.893	118.702	120.822
19	Nusa Tenggara Timur	184.282	186.257	182.384	185.206	188.514
20	Kalimantan Barat	2.022	2.043	2.113	2.146	2.184
21	Kalimantan Tengah	11.620	11.745	11.735	11.917	12.130

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
22	Kalimantan Selatan	24.173	24.432	19.967	20.276	20.638
23	Kalimantan Timur	6.068	6.133	6.650	6.752	6.873
24	Kalimantan Utara	3.683	3.723	4.022	4.084	4.157
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	2.822	2.852	2.919	2.964	3.017
27	Sulawesi Selatan	114.650	115.878	120.236	122.097	124.277
28	Sulawesi Tenggara	2.303	2.328	2.384	2.421	2.464
29	Gorontalo	22	23	-	-	-
30	Sulawesi Barat	8.621	8.713	9.081	9.222	9.386
31	Maluku	15.456	15.621	16.190	16.440	16.734
32	Maluku Utara	602	609	685	696	708
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	757	765	790	802	816
Nasional		1.144.019	1.156.277	1.171.414	1.189.539	1.210.785

PROYEKSI POPULASI KAMBING TAHUN 2020-2024 (EKOR)

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	613.864	616.423	634.940	637.588	640.246
2	Sumatera Utara	841.021	844.528	790.357	793.653	796.962
3	Sumatera Barat	248.078	249.112	249.509	250.550	251.594
4	Riau	235.352	236.334	235.925	236.909	237.897
5	Jambi	386.226	387.836	404.500	406.187	407.881
6	Sumatera Selatan	403.652	405.335	416.626	418.363	420.108
7	Bengkulu	202.784	203.629	207.095	207.959	208.826
8	Lampung	1.437.230	1.443.223	1.518.311	1.524.642	1.531.000
9	Kepulauan Bangka Belitung	8.885	8.922	9.083	9.120	9.158
10	Kepulauan Riau	21.934	22.025	18.772	18.851	18.929
11	DKI Jakarta	5.287	5.309	5.246	5.268	5.290
12	Jawa Barat	1.314.362	1.319.842	1.412.143	1.418.031	1.423.944
13	Jawa Tengah	3.942.393	3.958.832	3.726.536	3.742.075	3.757.678
14	DI. Yogyakarta	394.768	396.414	416.519	418.256	420.000
15	Jawa Timur	3.518.655	3.533.327	3.646.862	3.662.069	3.677.339
16	Banten	711.042	714.007	679.069	681.900	684.744
17	Bali	47.797	47.996	46.151	46.344	46.537
18	Nusa Tenggara Barat	697.811	700.721	709.970	712.931	715.904
19	Nusa Tenggara Timur	970.608	974.655	964.625	968.647	972.686
20	Kalimantan Barat	145.749	146.357	144.317	144.919	145.523
21	Kalimantan Tengah	45.511	45.700	48.985	49.189	49.394

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
22	Kalimantan Selatan	74.698	75.009	78.802	79.131	79.461
23	Kalimantan Timur	67.892	68.175	68.327	68.612	68.898
24	Kalimantan Utara	13.588	13.645	14.002	14.060	14.119
25	Sulawesi Utara	54.261	54.487	56.703	56.940	57.177
26	Sulawesi Tengah	542.231	544.492	555.557	557.874	560.200
27	Sulawesi Selatan	777.593	780.835	795.093	798.408	801.737
28	Sulawesi Tenggara	189.878	190.670	195.184	195.998	196.815
29	Gorontalo	100.754	101.174	104.566	105.002	105.440
30	Sulawesi Barat	195.204	196.018	196.770	197.591	198.415
31	Maluku	100.636	101.055	104.203	104.637	105.074
32	Maluku Utara	143.605	144.204	150.367	150.994	151.623
33	Papua Barat	17.986	18.061	18.417	18.494	18.571
34	Papua	68.769	69.055	71.508	71.807	72.106
Nasional		18.224.651	18.540.103	18.695.042	18.772.997	18.851.277

PROYEKSI POPULASI DOMBA TAHUN 2020-2024 (EKOR)

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	101.053	103.268	110.782	113.210	115.692
2	Sumatera Utara	756.601	773.186	783.688	800.867	818.422
3	Sumatera Barat	5.678	5.802	5.918	6.048	6.180
4	Riau	29.759	30.411	30.020	30.678	31.350
5	Jambi	81.121	82.899	78.269	79.985	81.738
6	Sumatera Selatan	36.638	37.441	39.786	40.658	41.549
7	Bengkulu	9.505	9.713	10.396	10.624	10.857
8	Lampung	82.317	84.121	91.739	93.750	95.805
9	Kepulauan Bangka Belitung	127	130	187	191	195
10	Kepulauan Riau	8	8	47	48	49
11	DKI Jakarta	1.510	1.543	1.826	1.866	1.907
12	Jawa Barat	12.587.078	12.862.990	12.987.572	13.272.263	13.563.194
13	Jawa Tengah	2.468.643	2.522.757	2.525.179	2.580.531	2.637.097
14	DI. Yogyakarta	150.428	153.726	160.949	164.478	168.083
15	Jawa Timur	1.453.298	1.485.154	1.541.701	1.575.495	1.610.030
16	Banten	331.086	338.344	518.963	530.339	541.964
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	23.729	24.249	25.043	25.592	26.153
19	Nusa Tenggara Timur	78.494	80.215	91.434	93.438	95.486
20	Kalimantan Barat	161	165	210	214	219

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
21	Kalimantan Tengah	554	566	573	586	599
22	Kalimantan Selatan	1.762	1.801	2.155	2.202	2.250
23	Kalimantan Timur	611	625	690	705	720
24	Kalimantan Utara	35	36	28	29	29
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	11.857	12.117	11.884	12.145	12.411
27	Sulawesi Selatan	865	884	933	953	974
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	11.573	11.827	12.272	12.541	12.816
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	160	164	142	145	149
Nasional		18.224.651	18.624.140	19.032.385	19.449.580	19.875.919

PROYEKSI POPULASI BABI TAHUN 2020-2024 (EKOR)

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	2.479	2.555	1.665	1.716	1.768
2	Sumatera Utara	980.301	1.010.185	230.351	237.373	244.609
3	Sumatera Barat	24.751	25.505	31.062	32.009	32.985
4	Riau	50.509	52.048	51.096	52.654	54.259
5	Jambi	1.246	1.284	2.021	2.082	2.146
6	Sumatera Selatan	15.134	15.595	18.292	18.850	19.424
7	Bengkulu	1.505	1.551	2.087	2.150	2.216
8	Lampung	45.149	46.525	43.099	44.413	45.766
9	Kepulauan Bangka Belitung	20.251	20.868	22.309	22.989	23.690
10	Kepulauan Riau	276.707	285.142	446.845	460.467	474.504
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	7.474	7.702	8.823	9.092	9.369
13	Jawa Tengah	128.214	132.123	125.072	128.885	132.814
14	DI. Yogyakarta	13.806	14.227	14.342	14.779	15.230
15	Jawa Timur	57.052	58.791	82.657	85.177	87.774
16	Banten	6.510	6.708	9.564	9.856	10.156
17	Bali	688.417	709.404	487.195	502.047	517.352
18	Nusa Tenggara Barat	64.164	66.120	85.035	87.628	90.299
19	Nusa Tenggara Timur	2.608.908	2.688.440	2.877.539	2.965.260	3.055.655
20	Kalimantan Barat	455.195	469.071	567.045	584.332	602.145
21	Kalimantan Tengah	224.950	231.808	276.997	285.441	294.143

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
22	Kalimantan Selatan	5.137	5.293	6.257	6.447	6.644
23	Kalimantan Timur	82.311	84.820	102.324	105.444	108.658
24	Kalimantan Utara	28.453	29.320	34.592	35.647	36.734
25	Sulawesi Utara	389.015	400.874	513.553	529.209	545.341
26	Sulawesi Tengah	258.920	266.813	280.304	288.849	297.655
27	Sulawesi Selatan	849.715	875.619	1.159.907	1.195.266	1.231.704
28	Sulawesi Tenggara	96.617	99.562	120.007	123.665	127.435
29	Gorontalo	10.658	10.983	13.836	14.258	14.692
30	Sulawesi Barat	165.206	170.242	207.100	213.413	219.919
31	Maluku	81.602	84.090	103.737	106.900	110.158
32	Maluku Utara	90.492	93.250	113.580	117.043	120.611
33	Papua Barat	86.770	89.415	112.645	116.079	119.617
34	Papua	963.088	992.448	1.173.284	1.209.051	1.245.909
Nasional		8.780.706	9.048.385	9.324.223	9.608.470	9.901.382

PROYEKSI POPULASI AYAM BURAS TAHUN 2020-2024 (EKOR)

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	4.704.735	4.824.712	5.303.620	5.438.869	5.577.567
2	Sumatera Utara	15.020.721	15.403.769	16.265.476	16.680.267	17.105.636
3	Sumatera Barat	4.346.792	4.457.641	4.495.681	4.610.326	4.727.896
4	Riau	7.057.980	7.237.967	6.695.742	6.866.492	7.041.597
5	Jambi	11.238.177	11.524.765	15.566.394	15.963.358	16.370.444
6	Sumatera Selatan	10.557.768	10.827.005	14.350.631	14.716.591	15.091.883
7	Bengkulu	4.240.579	4.348.719	3.723.107	3.818.051	3.915.417
8	Lampung	13.680.556	14.029.428	14.243.526	14.606.755	14.979.246
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.155.562	1.185.030	1.081.591	1.109.173	1.137.459
10	Kepulauan Riau	987.379	1.012.558	1.389.410	1.424.841	1.461.177
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	27.092.241	27.783.128	30.740.187	31.524.102	32.328.008
13	Jawa Tengah	42.890.066	43.983.819	41.902.974	42.971.555	44.067.386
14	DI. Yogyakarta	3.673.476	3.767.155	3.724.994	3.819.986	3.917.401
15	Jawa Timur	40.501.034	41.533.863	40.037.696	41.058.710	42.105.760
16	Banten	8.472.009	8.688.057	9.580.376	9.824.688	10.075.230
17	Bali	2.948.041	3.023.220	3.001.662	3.078.209	3.156.707
18	Nusa Tenggara Barat	8.619.521	8.839.330	8.201.787	8.410.943	8.625.434
19	Nusa Tenggara Timur	12.211.633	12.523.046	10.367.183	10.631.560	10.902.678

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
20	Kalimantan Barat	5.867.007	6.016.623	6.420.075	6.583.796	6.751.691
21	Kalimantan Tengah	2.945.394	3.020.506	3.069.423	3.147.697	3.227.968
22	Kalimantan Selatan	10.607.458	10.877.962	12.042.876	12.349.985	12.664.925
23	Kalimantan Timur	4.605.616	4.723.066	4.725.558	4.846.066	4.969.647
24	Kalimantan Utara	1.189.344	1.219.674	1.202.591	1.233.259	1.264.708
25	Sulawesi Utara	2.579.379	2.645.157	2.991.158	3.067.436	3.145.660
26	Sulawesi Tengah	4.968.100	5.094.793	5.019.875	5.147.888	5.279.166
27	Sulawesi Selatan	31.038.050	31.829.561	32.810.200	33.646.903	34.504.943
28	Sulawesi Tenggara	11.179.368	11.464.456	11.814.748	12.116.039	12.425.014
29	Gorontalo	2.300.583	2.359.251	2.520.178	2.584.445	2.650.352
30	Sulawesi Barat	5.463.355	5.602.678	5.313.101	5.448.592	5.587.539
31	Maluku	2.485.707	2.549.096	2.641.350	2.708.708	2.777.783
32	Maluku Utara	750.318	769.452	807.885	828.487	849.615
33	Papua Barat	1.501.487	1.539.777	651.203	667.809	684.839
34	Papua	2.577.261	2.642.984	2.738.783	2.808.626	2.880.250
Nasional		309.456.696	317.348.246	325.441.042	333.740.214	342.251.026

PROYEKSI POPULASI AYAM RAS PETELUR TAHUN 2020-2024 (EKOR)

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	697.108	710.890	208.189	212.305	216.502
2	Sumatera Utara	29.013.785	29.587.375	24.621.497	25.108.254	25.604.633
3	Sumatera Barat	16.087.641	16.405.686	17.523.640	17.870.075	18.223.359
4	Riau	692.123	705.806	381.091	388.625	396.308
5	Jambi	1.285.389	1.310.800	1.651.657	1.684.310	1.717.608
6	Sumatera Selatan	7.745.964	7.899.099	9.966.209	10.163.237	10.364.160
7	Bengkulu	613.852	625.988	366.839	374.091	381.487
8	Lampung	7.407.247	7.553.885	10.520.709	10.728.699	10.940.801
9	Kepulauan Bangka Belitung	599.023	610.865	459.229	468.307	477.566
10	Kepulauan Riau	791.950	807.607	877.047	894.386	912.067
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	26.547.440	27.072.272	31.964.416	32.596.338	33.240.754
13	Jawa Tengah	28.289.042	28.848.304	35.893.859	36.603.465	37.327.100
14	DI. Yogyakarta	3.558.287	3.628.633	5.840.248	5.955.707	6.073.449
15	Jawa Timur	92.431.396	94.258.725	88.347.995	90.094.598	91.875.729
16	Banten	11.571.721	11.800.489	13.315.540	13.578.783	13.847.230
17	Bali	10.548.866	10.757.412	10.556.429	10.765.126	10.977.948
18	Nusa Tenggara Barat	1.922.051	1.960.049	2.310.837	2.356.522	2.403.109
19	Nusa Tenggara Timur	520.165	530.448	211.533	215.715	219.980
20	Kalimantan Barat	6.534.063	6.663.239	3.837.476	3.913.342	3.990.707

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
21	Kalimantan Tengah	418.463	426.736	399.447	407.344	415.397
22	Kalimantan Selatan	4.913.284	5.010.417	4.765.714	4.859.930	4.956.009
23	Kalimantan Timur	1.888.063	1.925.389	1.462.520	1.491.434	1.520.919
24	Kalimantan Utara	34.371	35.050	76.503	78.016	79.558
25	Sulawesi Utara	1.505.399	1.535.160	1.796.155	1.831.664	1.867.875
26	Sulawesi Tengah	783.320	798.806	1.053.905	1.074.740	1.095.988
27	Sulawesi Selatan	10.830.619	11.044.736	9.820.886	10.015.041	10.213.034
28	Sulawesi Tenggara	160.331	163.501	164.085	167.328	170.636
29	Gorontalo	216.239	220.514	227.420	231.916	236.501
30	Sulawesi Barat	330.984	337.527	51.629	52.650	53.691
31	Maluku	35.058	35.751	57.064	58.192	59.342
32	Maluku Utara	5.005	5.104	8.690	8.861	9.037
33	Papua Barat	465.735	474.943	335.366	341.996	348.757
34	Papua	691.565	705.237	808.301	824.281	840.576
Nasional		269.135.550	274.456.245	279.882.128	285.415.278	291.057.816

PROYEKSI POPULASI AYAM RAS PEDAGING TAHUN 2020-2024 (EKOR)

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	33.328.203	33.469.847	35.837.430	36.142.048	36.449.256
2	Sumatera Utara	137.486.712	138.071.031	153.338.438	154.641.814	155.956.270
3	Sumatera Barat	57.893.566	58.139.614	59.779.856	60.287.985	60.800.433
4	Riau	96.875.647	97.287.369	93.184.703	93.976.773	94.775.575
5	Jambi	36.469.541	36.624.537	44.392.725	44.770.063	45.150.608
6	Sumatera Selatan	86.931.740	87.301.199	103.675.537	104.556.779	105.445.512
7	Bengkulu	8.607.301	8.643.882	9.526.384	9.607.358	9.689.021
8	Lampung	90.487.552	90.872.125	92.105.775	92.888.674	93.678.227
9	Kepulauan Bangka Belitung	19.906.757	19.991.361	20.550.700	20.725.381	20.901.546
10	Kepulauan Riau	23.849.257	23.950.616	22.639.240	22.831.673	23.025.743
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	811.146.443	814.593.815	781.590.710	788.234.230	794.934.221
13	Jawa Tengah	617.968.231	620.594.596	602.569.885	607.691.729	612.857.108
14	DI. Yogyakarta	51.245.533	51.463.327	56.821.769	57.304.754	57.791.845
15	Jawa Timur	459.570.078	461.523.251	423.783.359	427.385.517	431.018.294
16	Banten	200.741.443	201.594.594	216.591.204	218.432.230	220.288.904
17	Bali	77.479.777	77.809.066	78.874.906	79.545.343	80.221.478
18	Nusa Tenggara Barat	30.717.312	30.847.860	31.858.301	32.129.096	32.402.194
19	Nusa Tenggara Timur	18.870.166	18.950.364	14.845.651	14.971.839	15.099.099
20	Kalimantan Barat	53.568.878	53.796.545	55.641.413	56.114.365	56.591.337

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
21	Kalimantan Tengah	21.968.804	22.062.171	27.282.001	27.513.898	27.747.766
22	Kalimantan Selatan	78.105.752	78.437.701	96.113.490	96.930.455	97.754.364
23	Kalimantan Timur	42.404.256	42.584.474	57.038.669	57.523.498	58.012.447
24	Kalimantan Utara	4.681.629	4.701.526	4.376.029	4.413.225	4.450.737
25	Sulawesi Utara	9.811.979	9.853.680	10.629.671	10.720.023	10.811.143
26	Sulawesi Tengah	5.520.201	5.543.662	7.985.856	8.053.736	8.122.193
27	Sulawesi Selatan	76.337.385	76.661.819	86.815.517	87.553.448	88.297.653
28	Sulawesi Tenggara	3.794.969	3.811.097	6.401.940	6.456.357	6.511.236
29	Gorontalo	3.399.518	3.413.966	4.537.587	4.576.156	4.615.054
30	Sulawesi Barat	2.401.068	2.411.272	3.806.729	3.839.086	3.871.718
31	Maluku	676.803	679.680	638.218	643.643	649.114
32	Maluku Utara	126.469	127.007	106.177	107.080	107.990
33	Papua Barat	1.001.002	1.005.256	985.056	993.429	1.001.874
34	Papua	6.431.156	6.458.489	6.009.728	6.060.811	6.112.328
Nasional		3.169.805.127	3.183.276.799	3.210.334.652	3.237.622.496	3.265.142.287

PROYEKSI POPULASI ITIK TAHUN 2020-2024 (EKOR)

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	2.077.821	2.136.054	1.852.949	1.904.880	1.958.266
2	Sumatera Utara	2.492.845	2.562.709	2.768.249	2.845.832	2.925.588
3	Sumatera Barat	1.190.976	1.224.354	1.258.324	1.293.590	1.329.844
4	Riau	235.075	241.664	217.798	223.902	230.177
5	Jambi	900.585	925.824	808.586	831.247	854.544
6	Sumatera Selatan	2.096.683	2.155.444	2.133.755	2.193.556	2.255.032
7	Bengkulu	170.016	174.781	143.934	147.967	152.114
8	Lampung	924.154	950.054	787.731	809.808	832.503
9	Kepulauan Bangka Belitung	101.837	104.691	103.887	106.799	109.792
10	Kepulauan Riau	37.131	38.172	38.129	39.197	40.296
11	DKI Jakarta	8.789	9.035	10.958	11.266	11.581
12	Jawa Barat	8.408.572	8.644.230	10.513.371	10.808.017	11.110.920
13	Jawa Tengah	5.491.420	5.645.322	5.678.338	5.837.478	6.001.078
14	DI. Yogyakarta	418.082	429.799	470.976	484.176	497.745
15	Jawa Timur	6.474.032	6.655.473	6.895.463	7.088.714	7.287.381
16	Banten	1.973.247	2.028.549	2.114.697	2.173.963	2.234.891
17	Bali	551.369	566.822	511.247	525.576	540.305
18	Nusa Tenggara Barat	1.211.446	1.245.398	793.805	816.052	838.923
19	Nusa Tenggara Timur	255.864	263.035	268.516	276.042	283.778
20	Kalimantan Barat	574.725	590.832	598.444	615.216	632.458

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
21	Kalimantan Tengah	292.223	300.413	299.297	307.685	316.308
22	Kalimantan Selatan	4.861.728	4.997.982	4.692.178	4.823.680	4.958.868
23	Kalimantan Timur	270.361	277.938	274.123	281.805	289.703
24	Kalimantan Utara	25.837	26.561	20.683	21.262	21.858
25	Sulawesi Utara	166.267	170.926	179.191	184.213	189.376
26	Sulawesi Tengah	1.351.158	1.389.025	1.324.308	1.361.422	1.399.577
27	Sulawesi Selatan	5.074.435	5.216.650	5.525.340	5.680.192	5.839.384
28	Sulawesi Tenggara	582.533	598.859	621.633	639.055	656.965
29	Gorontalo	67.523	69.415	66.440	68.302	70.216
30	Sulawesi Barat	338.262	347.742	361.325	371.451	381.861
31	Maluku	233.825	240.378	296.510	304.820	313.363
32	Maluku Utara	78.939	81.151	91.265	93.823	96.452
33	Papua Barat	92.712	95.310	96.383	99.084	101.861
34	Papua	91.765	94.337	96.370	99.071	101.847
Nasional		49.122.238	50.498.929	51.914.203	53.369.141	54.864.855

PROYEKSI DAGING SAPI POTONG (*MEAT YIELD*) TAHUN 2020-2024 (TON)

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	8.051	8.401	12.015	12.587	13.220
2	Sumatera Utara	10.922	11.396	12.070	12.644	13.280
3	Sumatera Barat	16.508	17.225	19.500	20.428	21.455
4	Riau	6.455	6.735	8.121	8.507	8.935
5	Jambi	3.819	3.985	5.152	5.397	5.669
6	Sumatera Selatan	8.707	9.085	13.345	13.980	14.683
7	Bengkulu	2.361	2.463	2.858	2.994	3.145
8	Lampung	10.136	10.577	13.877	14.537	15.268
9	Kepulauan Bangka Belitung	2.260	2.358	2.775	2.907	3.054
10	Kepulauan Riau	1.050	1.096	2.103	2.203	2.314
11	DKI Jakarta	14.388	15.013	6.730	7.050	7.405
12	Jawa Barat	62.178	64.879	75.279	78.861	82.829
13	Jawa Tengah	48.091	50.180	55.720	58.372	61.309
14	DI. Yogyakarta	5.501	5.740	6.836	7.161	7.522
15	Jawa Timur	79.364	82.812	84.603	88.629	93.088
16	Banten	31.030	32.377	18.926	19.826	20.824
17	Bali	6.808	7.103	4.711	4.935	5.183
18	Nusa Tenggara Barat	8.217	8.574	10.512	11.012	11.566
19	Nusa Tenggara Timur	9.832	10.259	6.832	7.157	7.517

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
20	Kalimantan Barat	4.051	4.227	4.477	4.690	4.926
21	Kalimantan Tengah	2.887	3.012	3.717	3.893	4.089
22	Kalimantan Selatan	4.841	5.051	6.215	6.511	6.838
23	Kalimantan Timur	5.614	5.858	7.761	8.130	8.539
24	Kalimantan Utara	443	462	637	667	700
25	Sulawesi Utara	2.612	2.725	3.245	3.400	3.571
26	Sulawesi Tengah	3.756	3.919	3.955	4.143	4.352
27	Sulawesi Selatan	13.631	14.223	14.496	15.186	15.950
28	Sulawesi Tenggara	3.302	3.446	3.458	3.623	3.805
29	Gorontalo	1.443	1.505	2.312	2.422	2.544
30	Sulawesi Barat	8.051	8.401	1.618	1.695	1.780
31	Maluku	10.922	11.396	2.145	2.248	2.361
32	Maluku Utara	16.508	17.225	652	683	717
33	Papua Barat	6.455	6.735	1.534	1.607	1.688
34	Papua	3.819	3.985	3.230	3.384	3.554
Nasional		386.519	403.309	421.414	441.471	463.680

PROYEKSI DAGING KERBAU (*MEAT YIELD*) TAHUN 2020-2024 (TON)

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	2.320	2.364	2.984	3.053	3.131
2	Sumatera Utara	1.591	1.621	2.108	2.157	2.212
3	Sumatera Barat	1.971	2.009	2.262	2.314	2.374
4	Riau	1.542	1.572	2.038	2.085	2.138
5	Jambi	1.640	1.671	2.161	2.212	2.268
6	Sumatera Selatan	617	629	568	582	596
7	Bengkulu	261	266	628	643	659
8	Lampung	98	100	194	199	204
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	1	1	1	1
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	48	49	40	41	42
12	Jawa Barat	1.389	1.415	1.079	1.104	1.133
13	Jawa Tengah	1.533	1.562	1.919	1.964	2.014
14	DI. Yogyakarta	0	0	1	1	1
15	Jawa Timur	77	79	87	89	91
16	Banten	2.703	2.754	1.072	1.097	1.125
17	Bali	14	15	18	18	19
18	Nusa Tenggara Barat	1.061	1.081	1.213	1.241	1.273
19	Nusa Tenggara Timur	1.572	1.602	1.335	1.366	1.401

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
20	Kalimantan Barat	39	40	53	54	56
21	Kalimantan Tengah	77	78	116	119	122
22	Kalimantan Selatan	523	533	670	685	703
23	Kalimantan Timur	58	59	73	74	76
24	Kalimantan Utara	7	7	12	12	12
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	27	28	14	15	15
27	Sulawesi Selatan	2.841	2.895	2.130	2.180	2.236
28	Sulawesi Tenggara	16	16	21	22	23
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	150	153	252	258	265
31	Maluku	42	43	76	78	80
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	27	28	17	18	18
Nasional		22.246	22.671	23.143	23.680	24.287

PROYEKSI DAGING KAMBING (*MEAT YIELD*) TAHUN 2020-2024 (TON)

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	1.628	1.645	1.609	1.626	1.643
2	Sumatera Utara	849	858	702	709	717
3	Sumatera Barat	524	530	564	570	576
4	Riau	505	510	478	483	488
5	Jambi	816	825	813	822	831
6	Sumatera Selatan	1.214	1.227	1.191	1.204	1.217
7	Bengkulu	82	83	98	99	100
8	Lampung	1.374	1.389	2.202	2.226	2.249
9	Kepulauan Bangka Belitung	55	55	85	86	87
10	Kepulauan Riau	338	341	239	242	245
11	DKI Jakarta	602	608	659	666	673
12	Jawa Barat	3.186	3.220	4.785	4.836	4.887
13	Jawa Tengah	8.712	8.804	10.332	10.441	10.552
14	DI. Yogyakarta	1.266	1.279	1.472	1.488	1.504
15	Jawa Timur	18.597	18.794	16.261	16.433	16.607
16	Banten	3.099	3.131	2.536	2.563	2.590
17	Bali	709	717	1.425	1.440	1.456
18	Nusa Tenggara Barat	231	233	315	318	322
19	Nusa Tenggara Timur	2.090	2.112	613	619	626

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
20	Kalimantan Barat	301	305	318	321	325
21	Kalimantan Tengah	159	161	190	192	194
22	Kalimantan Selatan	194	196	188	190	192
23	Kalimantan Timur	410	414	472	477	482
24	Kalimantan Utara	72	73	87	88	89
25	Sulawesi Utara	94	95	128	129	130
26	Sulawesi Tengah	1.008	1.019	1.440	1.455	1.471
27	Sulawesi Selatan	817	826	631	637	644
28	Sulawesi Tenggara	224	227	268	271	274
29	Gorontalo	164	166	227	229	231
30	Sulawesi Barat	132	133	133	134	135
31	Maluku	168	170	198	200	202
32	Maluku Utara	56	56	93	94	95
33	Papua Barat	53	53	50	51	51
34	Papua	210	212	202	204	206
Nasional		49.940	50.469	51.004	51.545	52.091

PROYEKSI DAGING DOMBA (*MEAT YIELD*) TAHUN 2020-2024 (TON)

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	278	281	320	324	327
2	Sumatera Utara	459	464	456	461	466
3	Sumatera Barat	27	27	32	32	33
4	Riau	20	21	18	18	19
5	Jambi	101	102	147	149	150
6	Sumatera Selatan	122	123	132	134	135
7	Bengkulu	10	10	5	5	5
8	Lampung	41	41	102	103	105
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	-	-	-
10	Kepulauan Riau	0	0	-	-	-
11	DKI Jakarta	26	26	33	33	34
12	Jawa Barat	32.493	32.847	30.445	30.777	31.112
13	Jawa Tengah	4.637	4.687	6.202	6.270	6.338
14	DI. Yogyakarta	1.983	2.005	2.643	2.672	2.701
15	Jawa Timur	5.644	5.705	5.988	6.053	6.119
16	Banten	2.513	2.540	2.797	2.828	2.859
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	1	1	1
19	Nusa Tenggara Timur	47	48	125	126	127

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	1	1	1	1	1
22	Kalimantan Selatan	2	2	3	3	3
23	Kalimantan Timur	2	2	5	5	5
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	8	8	10	10	10
27	Sulawesi Selatan	-	-	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	24	24	35	35	35
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-
Nasional		48.438	48.966	49.500	50.039	50.585

PROYEKSI DAGING BABI (*MEAT YIELD*) TAHUN 2020-2024 (TON)

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	42	43	76	77	77
2	Sumatera Utara	27.026	27.310	6.842	6.914	6.987
3	Sumatera Barat	200	202	185	187	189
4	Riau	994	1.005	606	612	619
5	Jambi	134	135	129	131	132
6	Sumatera Selatan	211	213	141	142	144
7	Bengkulu	-	-	11	11	11
8	Lampung	574	580	225	227	230
9	Kepulauan Bangka Belitung	492	497	359	363	367
10	Kepulauan Riau	2.244	2.267	1.995	2.016	2.037
11	DKI Jakarta	3.558	3.596	2.560	2.587	2.614
12	Jawa Barat	746	754	561	567	573
13	Jawa Tengah	865	875	878	887	897
14	DI. Yogyakarta	180	182	176	178	179
15	Jawa Timur	2.280	2.304	2.094	2.115	2.138
16	Banten	2.719	2.747	3.299	3.334	3.369
17	Bali	48.402	48.910	101.550	102.616	103.693
18	Nusa Tenggara Barat	63	64	51	52	53
19	Nusa Tenggara Timur	31.366	31.695	7.560	7.640	7.720

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
20	Kalimantan Barat	7.659	7.739	5.998	6.061	6.124
21	Kalimantan Tengah	1.228	1.241	1.433	1.448	1.464
22	Kalimantan Selatan	33	33	23	24	24
23	Kalimantan Timur	885	894	1.009	1.020	1.031
24	Kalimantan Utara	150	151	269	272	275
25	Sulawesi Utara	15.642	15.806	15.658	15.822	15.988
26	Sulawesi Tengah	1.252	1.266	1.742	1.760	1.778
27	Sulawesi Selatan	3.432	3.468	1.543	1.559	1.576
28	Sulawesi Tenggara	610	616	366	369	373
29	Gorontalo	16	16	15	15	15
30	Sulawesi Barat	439	444	537	543	548
31	Maluku	477	482	424	428	433
32	Maluku Utara	232	234	194	196	198
33	Papua Barat	783	791	805	814	822
34	Papua	6.157	6.222	5.177	5.232	5.287
Nasional		161.090	162.782	164.491	166.218	167.963

PROYEKSI DAGING AYAM BURAS (*MEAT YIELD*) TAHUN 2020-2024 (TON)

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	5.586	5.639	11.616	11.726	11.838
2	Sumatera Utara	17.973	18.143	18.083	18.255	18.428
3	Sumatera Barat	5.345	5.395	5.754	5.809	5.864
4	Riau	3.134	3.164	3.193	3.224	3.254
5	Jambi	7.640	7.713	6.227	6.286	6.346
6	Sumatera Selatan	4.382	4.424	8.154	8.231	8.309
7	Bengkulu	4.587	4.631	4.193	4.232	4.273
8	Lampung	13.313	13.440	16.039	16.192	16.346
9	Kepulauan Bangka Belitung	559	564	443	447	452
10	Kepulauan Riau	1.068	1.078	1.565	1.579	1.594
11	DKI Jakarta	1.422	1.435	1.275	1.287	1.299
12	Jawa Barat	27.123	27.381	39.329	39.703	40.080
13	Jawa Tengah	34.430	34.757	33.250	33.566	33.885
14	DI. Yogyakarta	5.352	5.403	5.650	5.703	5.757
15	Jawa Timur	50.902	51.385	50.194	50.671	51.152
16	Banten	4.150	4.190	4.498	4.541	4.584
17	Bali	3.335	3.367	4.998	5.045	5.093
18	Nusa Tenggara Barat	11.718	11.830	11.607	11.717	11.829
19	Nusa Tenggara Timur	11.889	12.002	11.674	11.785	11.897

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
20	Kalimantan Barat	3.229	3.259	3.798	3.834	3.870
21	Kalimantan Tengah	2.250	2.272	2.291	2.313	2.335
22	Kalimantan Selatan	2.822	2.849	2.164	2.185	2.205
23	Kalimantan Timur	5.109	5.158	5.457	5.509	5.561
24	Kalimantan Utara	1.319	1.332	1.354	1.367	1.380
25	Sulawesi Utara	2.790	2.817	3.368	3.400	3.433
26	Sulawesi Tengah	8.597	8.679	9.042	9.128	9.215
27	Sulawesi Selatan	26.636	26.889	6.260	6.319	6.379
28	Sulawesi Tenggara	12.094	12.209	13.304	13.431	13.558
29	Gorontalo	2.489	2.512	2.838	2.865	2.892
30	Sulawesi Barat	5.910	5.966	5.983	6.040	6.097
31	Maluku	269	271	343	346	350
32	Maluku Utara	1.124	1.135	1.260	1.272	1.284
33	Papua Barat	1.624	1.640	733	740	747
34	Papua	4.933	4.980	4.802	4.848	4.894
Nasional		295.106	297.910	300.740	303.597	306.481

PROYEKSI DAGING AYAM RAS PEDAGING (*MEAT YIELD*) TAHUN 2020-2024 (TON)

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	36.748	36.905	39.515	39.851	40.190
2	Sumatera Utara	151.596	152.240	169.074	170.511	171.961
3	Sumatera Barat	63.835	64.106	65.914	66.475	67.040
4	Riau	106.817	107.271	102.747	103.621	104.501
5	Jambi	40.212	40.383	48.948	49.364	49.784
6	Sumatera Selatan	95.853	96.260	114.315	115.286	116.266
7	Bengkulu	9.491	9.531	10.504	10.593	10.683
8	Lampung	99.773	100.197	101.558	102.421	103.291
9	Kepulauan Bangka Belitung	21.950	22.043	22.660	22.852	23.046
10	Kepulauan Riau	26.297	26.408	24.962	25.175	25.389
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	894.386	898.187	861.798	869.123	876.510
13	Jawa Tengah	681.384	684.280	664.406	670.053	675.749
14	DI. Yogyakarta	56.504	56.744	62.653	63.185	63.722
15	Jawa Timur	506.731	508.885	467.272	471.244	475.249
16	Banten	221.342	222.282	238.818	240.848	242.895
17	Bali	85.431	85.794	86.969	87.708	88.454
18	Nusa Tenggara Barat	33.870	34.013	35.128	35.426	35.727
19	Nusa Tenggara Timur	20.807	20.895	16.369	16.508	16.649

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
20	Kalimantan Barat	59.066	59.317	61.351	61.873	62.399
21	Kalimantan Tengah	24.223	24.326	30.082	30.337	30.595
22	Kalimantan Selatan	86.121	86.487	105.977	106.877	107.786
23	Kalimantan Timur	46.756	46.954	62.892	63.427	63.966
24	Kalimantan Utara	5.162	5.184	4.825	4.866	4.907
25	Sulawesi Utara	10.819	10.865	11.720	11.820	11.921
26	Sulawesi Tengah	6.087	6.113	8.805	8.880	8.956
27	Sulawesi Selatan	84.171	84.529	95.725	96.538	97.359
28	Sulawesi Tenggara	4.184	4.202	7.059	7.119	7.179
29	Gorontalo	3.748	3.764	5.003	5.046	5.089
30	Sulawesi Barat	2.647	2.659	4.197	4.233	4.269
31	Maluku	746	749	704	710	716
32	Maluku Utara	139	140	117	118	119
33	Papua Barat	1.104	1.108	1.086	1.095	1.105
34	Papua	7.091	7.121	6.626	6.683	6.740
Nasional		3.495.091	3.509.945	3.539.779	3.569.867	3.600.211

PROYEKSI DAGING ITIK (*MEAT YIELD*) TAHUN 2020-2024 (TON)

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	1.431	1.445	1.284	2.513	1.310
2	Sumatera Utara	2.274	2.297	2.547	42	2.599
3	Sumatera Barat	742	749	789	532	805
4	Riau	244	247	203	72	207
5	Jambi	568	574	589	26	601
6	Sumatera Selatan	2.522	2.547	2.488	834	2.538
7	Bengkulu	48	49	41	6.794	42
8	Lampung	721	728	527	6.307	537
9	Kepulauan Bangka Belitung	63	64	71	477	73
10	Kepulauan Riau	25	25	25	9.164	26
11	DKI Jakarta	1.172	1.184	826	1.367	842
12	Jawa Barat	6.695	6.762	6.726	300	6.862
13	Jawa Tengah	4.528	4.574	6.245	834	6.370
14	DI. Yogyakarta	416	421	472	181	481
15	Jawa Timur	9.049	9.139	9.073	373	9.256
16	Banten	1.286	1.299	1.353	207	1.381
17	Bali	318	321	297	1.696	303
18	Nusa Tenggara Barat	1.252	1.264	825	122	842
19	Nusa Tenggara Timur	170	172	179	14	183

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
20	Kalimantan Barat	307	310	369	121	377
21	Kalimantan Tengah	170	172	205	894	209
22	Kalimantan Selatan	1.759	1.776	1.679	2.122	1.713
23	Kalimantan Timur	118	119	121	420	123
24	Kalimantan Utara	11	11	14	45	14
25	Sulawesi Utara	110	112	120	244	122
26	Sulawesi Tengah	898	907	885	68	903
27	Sulawesi Selatan	2.414	2.438	2.101	62	2.143
28	Sulawesi Tenggara	387	391	416	65	424
29	Gorontalo	45	45	44	65	45
30	Sulawesi Barat	225	227	242	2.513	246
31	Maluku	52	52	68	42	69
32	Maluku Utara	64	65	61	532	62
33	Papua Barat	62	62	64	72	66
34	Papua	61	62	64	26	66
Nasional		40.207	40.609	41.015	41.425	41.839

PROYEKSI TELUR AYAM BURAS TAHUN 2020-2024 (TON)

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	6.506	6.748	8.539	8.857	9.186
2	Sumatera Utara	12.475	12.938	9.568	9.924	10.293
3	Sumatera Barat	2.822	2.927	2.073	2.150	2.230
4	Riau	14.559	15.100	6.278	6.511	6.753
5	Jambi	6.224	6.456	12.226	12.680	13.152
6	Sumatera Selatan	9.461	9.813	8.264	8.571	8.889
7	Bengkulu	2.796	2.900	1.739	1.804	1.871
8	Lampung	9.002	9.337	41.451	42.992	44.591
9	Kepulauan Bangka Belitung	788	817	927	961	997
10	Kepulauan Riau	651	675	4.043	4.194	4.350
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	47.063	48.813	45.836	47.540	49.308
13	Jawa Tengah	35.760	37.090	24.163	25.061	25.993
14	DI. Yogyakarta	2.385	2.473	1.713	1.776	1.842
15	Jawa Timur	22.261	23.088	15.488	16.063	16.660
16	Banten	11.485	11.912	14.053	14.575	15.117
17	Bali	1.134	1.176	15.014	15.572	16.151
18	Nusa Tenggara Barat	3.679	3.816	2.480	2.572	2.668
19	Nusa Tenggara Timur	5.282	5.478	6.896	7.152	7.418

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
20	Kalimantan Barat	3.620	3.755	3.482	3.612	3.746
21	Kalimantan Tengah	2.544	2.639	1.878	1.948	2.020
22	Kalimantan Selatan	8.819	9.147	7.092	7.356	7.629
23	Kalimantan Timur	2.998	3.109	2.179	2.260	2.344
24	Kalimantan Utara	774	803	3.500	3.630	3.765
25	Sulawesi Utara	2.173	2.253	1.623	1.683	1.746
26	Sulawesi Tengah	3.269	3.391	2.340	2.427	2.517
27	Sulawesi Selatan	20.424	21.183	15.293	15.862	16.451
28	Sulawesi Tenggara	7.372	7.646	5.519	5.724	5.937
29	Gorontalo	1.146	1.188	889	922	956
30	Sulawesi Barat	3.595	3.729	2.476	2.569	2.664
31	Maluku	1.636	1.696	1.318	1.367	1.417
32	Maluku Utara	472	490	2.351	2.439	2.529
33	Papua Barat	990	1.027	1.895	1.966	2.039
34	Papua	1.696	1.759	2.653	2.752	2.854
Nasional		255.863	265.374	275.240	285.472	296.084

PROYEKSI TELUR AYAM RAS PETELUR TAHUN 2020-2024 (TON)

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	12.555	12.804	3.750	3.824	3.899
2	Sumatera Utara	522.562	532.893	443.454	452.220	461.161
3	Sumatera Barat	289.752	295.480	315.615	321.855	328.218
4	Riau	12.466	12.712	6.864	6.999	7.138
5	Jambi	23.151	23.609	29.748	30.336	30.936
6	Sumatera Selatan	139.511	142.269	179.500	183.048	186.667
7	Bengkulu	11.056	11.275	6.607	6.738	6.871
8	Lampung	133.411	136.048	189.487	193.233	197.053
9	Kepulauan Bangka Belitung	10.789	11.002	8.271	8.435	8.601
10	Kepulauan Riau	14.264	14.546	15.796	16.109	16.427
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	478.141	487.594	575.706	587.087	598.694
13	Jawa Tengah	509.509	519.582	646.478	659.259	672.292
14	DI. Yogyakarta	64.088	65.355	105.188	107.267	109.388
15	Jawa Timur	1.664.766	1.697.678	1.591.221	1.622.678	1.654.758
16	Banten	208.416	212.537	239.824	244.565	249.400
17	Bali	189.994	193.750	190.130	193.889	197.722
18	Nusa Tenggara Barat	34.618	35.302	41.620	42.443	43.282
19	Nusa Tenggara Timur	9.369	9.554	3.810	3.885	3.962

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
20	Kalimantan Barat	117.684	120.010	69.116	70.483	71.876
21	Kalimantan Tengah	7.537	7.686	7.194	7.337	7.482
22	Kalimantan Selatan	88.492	90.242	85.834	87.531	89.262
23	Kalimantan Timur	34.006	34.678	26.341	26.862	27.393
24	Kalimantan Utara	619	631	1.378	1.405	1.433
25	Sulawesi Utara	27.113	27.650	32.350	32.990	33.642
26	Sulawesi Tengah	14.108	14.387	18.982	19.357	19.740
27	Sulawesi Selatan	198.528	202.453	176.882	180.379	183.945
28	Sulawesi Tenggara	2.888	2.945	2.955	3.014	3.073
29	Gorontalo	3.895	3.972	4.096	4.177	4.260
30	Sulawesi Barat	2.501	2.551	930	948	967
31	Maluku	631	644	1.028	1.048	1.069
32	Maluku Utara	90	92	157	160	163
33	Papua Barat	8.388	8.554	6.040	6.160	6.281
34	Papua	12.456	12.702	14.558	14.846	15.139
Nasional		4.847.355	4.943.185	5.040.909	5.140.566	5.242.193

PROYEKSI TELUR ITIK TAHUN 2020-2024 (TON)

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	7.883	8.143	7.274	7.514	7.762
2	Sumatera Utara	12.049	12.447	12.611	13.027	13.457
3	Sumatera Barat	6.592	6.810	6.565	6.781	7.005
4	Riau	1.771	1.830	1.534	1.585	1.637
5	Jambi	4.710	4.865	4.676	4.830	4.990
6	Sumatera Selatan	16.993	17.554	16.687	17.238	17.807
7	Bengkulu	1.099	1.136	877	906	936
8	Lampung	5.976	6.174	5.998	6.196	6.401
9	Kepulauan Bangka Belitung	489	505	601	621	642
10	Kepulauan Riau	240	248	290	300	310
11	DKI Jakarta	61	63	83	86	89
12	Jawa Barat	50.105	51.758	65.591	67.756	69.991
13	Jawa Tengah	38.332	39.596	37.386	38.619	39.894
14	DI. Yogyakarta	2.314	2.391	2.457	2.538	2.622
15	Jawa Timur	42.138	43.529	43.236	44.663	46.137
16	Banten	15.032	15.528	11.857	12.248	12.653
17	Bali	1.799	1.858	1.572	1.624	1.677
18	Nusa Tenggara Barat	5.716	5.905	6.044	6.244	6.450
19	Nusa Tenggara Timur	1.216	1.256	2.045	2.112	2.182

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
20	Kalimantan Barat	2.654	2.742	3.685	3.807	3.932
21	Kalimantan Tengah	1.732	1.789	1.672	1.727	1.784
22	Kalimantan Selatan	31.440	32.478	35.729	36.907	38.125
23	Kalimantan Timur	1.497	1.546	2.087	2.156	2.227
24	Kalimantan Utara	143	148	157	163	168
25	Sulawesi Utara	981	1.013	1.364	1.409	1.456
26	Sulawesi Tengah	8.738	9.026	8.072	8.338	8.613
27	Sulawesi Selatan	32.816	33.898	33.677	34.788	35.936
28	Sulawesi Tenggara	3.767	3.891	3.789	3.914	4.043
29	Gorontalo	437	451	450	465	481
30	Sulawesi Barat	2.187	2.260	2.202	2.275	2.350
31	Maluku	1.137	1.174	1.627	1.681	1.736
32	Maluku Utara	479	494	695	718	742
33	Papua Barat	600	619	734	758	783
34	Papua	593	613	763	788	814
Nasional		303.715	313.737	324.090	334.784	345.831

PROYEKSI TELUR PUYUH TAHUN 2020-2024 (TON)

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	-	-	125	134	144
2	Sumatera Utara	450	482	878	941	1.008
3	Sumatera Barat	2.727	2.921	3.554	3.808	4.080
4	Riau	224	240	326	349	374
5	Jambi	-	-	4	4	5
6	Sumatera Selatan	-	-	74	79	85
7	Bengkulu	245	262	214	229	246
8	Lampung	434	465	371	398	426
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	1	15	17	18
10	Kepulauan Riau	165	177	199	213	228
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	1.612	1.727	1.784	1.912	2.048
13	Jawa Tengah	11.539	12.364	11.891	12.741	13.651
14	DI. Yogyakarta	3.201	3.430	3.486	3.735	4.002
15	Jawa Timur	5.057	5.419	6.363	6.817	7.304
16	Banten	50	54	78	83	89
17	Bali	17	18	21	22	24
18	Nusa Tenggara Barat	106	114	165	176	189

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
19	Nusa Tenggara Timur	8	9	6	6	7
20	Kalimantan Barat	39	42	113	121	130
21	Kalimantan Tengah	80	86	111	119	128
22	Kalimantan Selatan	997	1.069	1.143	1.225	1.312
23	Kalimantan Timur	78	84	104	112	120
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	298	319	339	363	389
26	Sulawesi Tengah	202	216	147	157	168
27	Sulawesi Selatan	60	64	145	156	167
28	Sulawesi Tenggara	14	15	21	22	24
29	Gorontalo	72	77	97	104	112
30	Sulawesi Barat	2	2	1	1	1
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	29	31	33	35	38
Nasional		27.710	29.689	31.810	34.082	36.516

PROYEKSI TELUR ITIK MANILA TAHUN 2020-2024 (TON)

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	-	-	2.835	2.875	2.915
2	Sumatera Utara	3.797	3.850	3.806	3.859	3.913
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	31	32	42	43	43
5	Jambi	-	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	663	672	682
7	Bengkulu	639	648	600	608	617
8	Lampung	1.045	1.060	1.148	1.164	1.181
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	6	6	6	6	6
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	15.529	15.748	10.351	10.497	10.645
13	Jawa Tengah	2.515	2.550	3.458	3.506	3.556
14	DI. Yogyakarta	387	393	523	530	537
15	Jawa Timur	1.717	1.741	1.967	1.995	2.023
16	Banten	938	951	1.048	1.063	1.078
17	Bali	157	159	149	151	153
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
19	Nusa Tenggara Timur	165	167	207	210	212
20	Kalimantan Barat	38	39	41	42	42
21	Kalimantan Tengah	22	22	25	26	26
22	Kalimantan Selatan	93	95	99	100	102
23	Kalimantan Timur	239	243	324	329	333
24	Kalimantan Utara	82	83	89	91	92
25	Sulawesi Utara	307	311	345	350	355
26	Sulawesi Tengah	489	496	537	544	552
27	Sulawesi Selatan	5.790	5.871	6.494	6.586	6.679
28	Sulawesi Tenggara	242	245	264	267	271
29	Gorontalo	99	101	112	114	115
30	Sulawesi Barat	140	142	158	160	163
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	251	254	281	285	289
33	Papua Barat	13	13	29	30	30
34	Papua	431	437	558	566	573
Nasional		35.161	35.656	36.158	36.667	37.183

PROYEKSI PRODUKSI SUSU TAHUN 2020-2024

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	0	0	10	9	10
2	Sumatera Utara	4.174	4.283	3.842	3.715	3.746
3	Sumatera Barat	1.058	1.086	1.104	1.067	1.076
4	Riau	58	59	49	47	48
5	Jambi	8	8	7	7	7
6	Sumatera Selatan	58	60	34	32	33
7	Bengkulu	488	501	294	284	286
8	Lampung	1.533	1.573	2.300	2.224	2.243
9	Kepulauan Bangka Belitung	162	166	451	436	440
10	Kepulauan Riau	8	8	14	13	13
11	DKI Jakarta	5.211	5.346	4.625	4.472	4.510
12	Jawa Barat	299.828	307.624	302.945	292.916	295.405
13	Jawa Tengah	102.083	104.737	110.651	106.988	107.897
14	DI. Yogyakarta	5.528	5.672	5.802	5.610	5.658
15	Jawa Timur	545.686	559.874	584.842	565.481	570.285
16	Banten	53	55	131	126	127
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	23	24	50	49	49
20	Kalimantan Barat	-	-	125	121	122
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
22	Kalimantan Selatan	0	0	120	116	117
23	Kalimantan Timur	144	148	132	127	128
24	Kalimantan Utara	-	-	7	7	7
25	Sulawesi Utara	22	23	15	14	14
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	1.960	2.011	2.480	2.398	2.418
28	Sulawesi Tenggara	65	66	115	111	112
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-
Nasional		968.151	993.322	1.020.142	986.370	994.750

Lampiran 2. Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ditjen PKH Tahun 2020-2024 (Semula)

Program/Kegiatan/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Unit Kerja
			2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM PEMENUHAN PANGAN ASAL TERNAK DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN RAKYAT			1.299.578	2.132.854	2.671.790	2.976.242	3.313.082	
Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak								
Peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik)	%	4480,8 ribu ton	0,4	0,85	1,2	1,24	1,28	
Peningkatan Produksi susu	%	944,54 ribu ton	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	
Peningkatan Produksi telur	%	5354,62 ribu ton	2,15	2,15	2,16	2,16	2,16	
Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan								

Program/Kegiatan/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Unit Kerja
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk peternakan	%	US\$ 744,3 ribu	15	15	20	25	30	
Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak								
Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	%	81	81,5	82	82,5	83	83,5	
Tersedianya sarana peternakan								
Tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan	%		85	87	90	92	95	
Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis								
Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	80	80	80,5	80,5	81	81	

Program/Kegiatan/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Unit Kerja
			2020	2021	2022	2023	2024	
Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia								
Jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia	Kasus	122	122	120	118	116	114	
Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima								
Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai		32,3	32,75	33,5	34	34,5	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Skala Likert (1-4)		3,37	3,44	3,51	3,55	3,58	
Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas								

Program/Kegiatan/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Satuan	Baseline	Target					Unit Kerja
				2020	2021	2022	2023	2024	
	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	87,82	88,25	88,68	88,93	90,32	90,85	
Peningkatan Produksi Pakan Ternak		Juta Rp		77.088	155.507	194.385	242.985	303.735	Direktorat Pakan
Terpenuhinya pakan ternak sesuai kebutuhan									
	Jumlah pakan ternak sapi untuk produksi	Ton		26.883.537	27.891.703	29.011.374	30.253.677	31.630.622	
	Jumlah pakan ternak kerbau untuk produksi	Ton		1.469.695	1.482.922	1.498.811	1.518.432	1.541.926	
	Jumlah pakan ternak kambing dan domba untuk produksi	Ton		14.020.112	14.171.382	14.322.652	14.476.777	14.632.198	
	Jumlah pakan ternak ayam ras pedaging untuk produksi	Ton		9.464.113	9.758.424	10.052.734	10.347.045	10.641.356	
	Jumlah pakan ternak itik untuk produksi	Ton		654.948	675.315	695.682	715.475	736.417	
	Jumlah pakan ternak babi untuk produksi	Ton		4.374.966	4.421.346	4.467.323	4.514.229	4.561.629	

Program/Kegiatan/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Unit Kerja
			2020	2021	2022	2023	2024	
Terpenuhinya pakan ternak perah sesuai kebutuhan								
Jumlah pakan ternak perah untuk produksi susu (sapi, kerbau, kambing)	Ton		6.126.555	6.264.828	6.413.738	6.583.920	6.775.375	
Terpenuhinya pakan untuk ayam petelur sesuai dengan kebutuhan								
Jumlah pakan ternak untuk ayam petelur	Ton		13.007.193	13.280.990	13.553.714	13.825.116	14.102.574	
Tersedianya sarana prasarana pakan ternak								
Tingkat pemanfaatan sarana prasarana pakan	%		85	87	90	92	95	
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Juta Rp		171.603	306.266	362.046	416.352	478.805	Direktorat Kesehatan Hewan
Meningkatnya mutu, keamanan, dan kesehatan hewan komoditas								

Program/Kegiatan/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Unit Kerja
			2020	2021	2022	2023	2024	
peternakan dan kesehatan hewan								
Rasio ekspor ternak yang ditolak negara tujuan karena alasan kesehatan hewan terhadap total ekspor ternak pernegara tujuan (alasanpenolakan : kesehatan hewan)	%		0	0	0	0	0	
Rasio ekspor non ternak yang ditolak negara tujuan karena alasan kesehatan hewan terhadap total ekspor non ternak pernegara tujuan (alasanpenolakan : kesehatan hewan)	%		0	0	0	0	0	
Rasio ekspor obat hewan yang ditolak negara tujuan karena alasan mutu dan keamanan terhadap total ekspor obat hewan per negara tujuan (alasan	%		0	0	0	0	0	

Program/Kegiatan/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Unit Kerja
			2020	2021	2022	2023	2024	
penolakan : mutu dan keamanan)								
Meningkatnya kesehatan hewan komoditas strategis								
Rasio ternak sapi yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak sapi (d disesuaikan dinamika populasi)	%		2,74	2,74	2,6	2,5	2,4	
Rasio ternak kerbau yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak kerbau (d disesuaikan dinamika populasi)	%		3,21	3,21	3,15	3	2,9	
Rasio ternak kambing yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak kambing	%		9,61	9,61	9,4	9,2	9	
Rasio ternak domba yang mati karena penyakit	%		8,53	8,53	8,3	8,1	7,9	

Program/Kegiatan/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Unit Kerja
			2020	2021	2022	2023	2024	
terhadap total populasi ternak domba								
Rasio ternak ayam yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak ayam buras	%		25,51	25,51	25,4	25,3	25,2	
Rasio ternak ayam yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak ayam ras pedaging	%		4,42	4,42	4,3	4,2	4,1	
Rasio ternak itik yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak itik	%		9,01	9,01	8,9	8,7	8,5	
Rasio ternak babi yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak babi	%		19,53	19,53	19,3	19,1	18,9	
Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis								

Program/Kegiatan/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Satuan	Baseline	Target					Unit Kerja
				2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	80	80	80,5	80,5	81	81	
Meningkatnya kesehatan ternak perah									
	Rasio ternak perah yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak perah	%		3,79	2,94	2,8	2,7	2,6	
Meningkatnya kesehatan ayam petelur									
	Rasio ayam petelur yang mati karena penyakit terhadap total populasi ayam petelur	%		4,24	4,24	3,9	3,8	3,7	
Tersedianya sarana prasarana kesehatan hewan									
	Tingkat kemanfaatan sarana prasana kesehatan hewan	%		91	92	92	92	92	

Program/Kegiatan/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Unit Kerja
			2020	2021	2022	2023	2024	
Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak			619.446	1.175.866	1.501.005	1.674.350	1.851.718	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak
Meningkatnya mutu produk peternakan untuk komoditas ekspor								
Rasio Ekspor ternak yang ditolak negara tujuan karena alasan mutu ternak terhadap total ekspor ternak per negara tujuan (alasan penolakan : mutu ternak)	%		20	20	15	15	15	
Terpenuhinya populasi ternak sesuai kebutuhan produksi				2.261.847				
Jumlah populasi ternak sapi siap potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor		2.142.648	2.223.000	2.312.239	2.411.252	2.520.996	
Jumlah populasi ternak kerbau siap potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor		130.162	131.333	132.741	134.478	136.559	
Jumlah populasi ternak kambing siap potong	Ekor		3.977.698	4.019.912	4.062.127	4.105.137	4.148.945	

Program/Kegiatan/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Unit Kerja
			2020	2021	2022	2023	2024	
sesuai kebutuhan produksi								
Jumlah populasi ternak domba siap potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor		4.629.869	4.680.526	4.731.183	4.782.796	4.834.409	
Jumlah populasi ternak ayam sesuai kebutuhan produksi	Ekor		3.004.480.237	3.097.912.245	3.191.344.252	3.284.776.260	3.378.208.267	
Jumlah populasi ternak itik sesuai kebutuhan produksi	Ekor		30.770.385	31.727.269	32.684.153	33.614.037	34.597.921	
Jumlah populasi ternak babi potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor		3.995.403	4.037.355	4.079.747	4.122.584	4.165.871	
Terpenuhinya bibit ternak sesuai kebutuhan								
Jumlah betina produktif ternak sapi potong yang diajukan	Ekor		2.657.090	2.757.261	2.868.590	2.992.134	3.129.092	
Jumlah betina produktif ternak kerbau potong yang diajukan	Ekor		372.372	376.361	381.288	387.188	394.104	

Program/Kegiatan/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Unit Kerja
			2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah betina produktif ternak kambing potong yang diajukan	Ekor		3.672.382	3.687.696	3.703.072	3.718.514	3.734.019	
Jumlah betina produktif ternak domba potong yang diajukan	Ekor		3.606.858	3.685.921	3.766.718	3.849.285	3.933.662	
Jumlah betina produktif ternak ayam yang diajukan	Ekor		17.350.891	17.890.461	18.430.031	18.969.602	19.509.172	
Jumlah betina produktif ternak itik yang diajukan	Ekor		190.883	196.819	202.691	208.691	214.627	
Jumlah betina produktif ternak babi potong yang diajukan	Ekor		463.131	477.213	491.770	506.749	522.203	
Tersedianya standar benih dan bibit ternak sesuai kebutuhan								
Rasio standar benih ternak yang dihasilkan terhadap total standar benih ternak yang direncanakan	%		90	90	90	90	90	
Rasio standar bibit ternak yang dihasilkan terhadap	%		90	90	90	90	90	

Program/Kegiatan/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Unit Kerja
			2020	2021	2022	2023	2024	
total standar bibit ternak yang direncanakan								
Meningkatnya ketersediaan benih dan bibit bermutu								
Rasio benih dan bibit yang bersertifikat terhadap total benih dan bibit yang diajukan	%		70	75	80	85	90	
Meningkatnya produksi susu untuk memenuhi kebutuhan protein nasional								
Produksi susu	Ton		968.150	993.320	1.020.140	1.048.710	1.079.120	
Jumlah betina produktif ternak perah sesuai kebutuhan produksi susu	Ekor		308.160	315.115	322.605	331.165	340.795	
Meningkatnya produksi telur untuk memenuhi kebutuhan protein nasional								
Produksi telur	Ton		4.795.165	4.896.101	4.996.643	5.096.696	5.198.982	
Jumlah betina produktif ternak ayam ras petelur sesuai kebutuhan produksi telur	Ekor		267.913.341	273.552.827	279.170.226	284.760.370	290.475.270	

Program/Kegiatan/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Unit Kerja
			2020	2021	2022	2023	2024	
Tersedianya sarana prasarana perbibitan dan produksi ternak								
Tingkat kemanfaatan sarana prasana perbibitan dan produksi ternak	%		90	91	92	93	95	
Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Juta Rupiah		30.369	76.816	92.947	102.242	112.466	
Meningkatnya produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan ekspor terkait alasan mutu dan keamanan produk								
Rasio ekspor produk hewan pangan dan non pangan yang ditolak negara tujuan karena alasan mutu dan keamanan produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan	%		0	0	0	0	0	

Program/Kegiatan/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Unit Kerja
			2020	2021	2022	2023	2024	
per negara tujuan (alasan penolakan: mutu dan keamanan produk)								
Meningkatnya daging yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat								
Rasio penjaminan daging ruminansia yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak ruminansia yang dipotong	%	15,7	17,5	20,2	23,8	28,3	33,7	
Rasio penjaminan daging unggas yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak unggas yang dipotong	%	48,3	51,3	52	52,8	53,5	54,3	
Rasio penjaminan daging babi yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak babi yang dipotong	%	1,7	1,7	1,7	2,5	3,3	3,3	
Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak								

Program/Kegiatan/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Unit Kerja
			2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	%	81	81,5	82	82,5	83	83,5	
Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia								
Jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia	Kasus	122	122	120	118	116	114	
Meningkatnya produk susu dan telur yang berstatus sehat untuk dikonsumsi masyarakat								
Rasio produk susu yang berstatus sehat terhadap total produk susu yang dihasilkan	%	88	88,2	88,5	89	89,2	89,5	
Rasio produk telur yang berstatus sehat terhadap total produk telur yang dihasilkan	%	95	95,2	95,5	95,7	96	96,2	
Tersedianya sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner								

Program/Kegiatan/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Unit Kerja
			2020	2021	2022	2023	2024	
Tingkat kemanfaatan sarana prasana kesehatan masyarakat veteriner	%	90	90	92	93	95	95	
Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	Juta Rupiah		25.829	65.484	87.438	100.554	120.664	
Meningkatnya daya saing komoditas hasil peternakan								
Nilai ekspor hewan hidup	US\$ 000	66.038	75.944	87.335	104.802	131.003	170.304	
Nilai ekspor produk pangan segar dan olahan	US\$ 000	523.890	602.474	692.845	831.414	1.039.267	1.351.047	
Nilai ekspor produk non pangan	US\$ 000	138.127	158.846	182.673	219.208	274.010	356.213	
Nilai ekspor obat hewan	US\$ 000	14.127	16.245	18.682	22.419	28.023	36.430	
Nilai ekspor benih dan bibit ternak	US\$ 000	2.196	2.526	2.905	3.486	4.357	5.664	
Jumlah ekspor hewan hidup	Ton	31.279	35.971	41.367	49.640	62.051	80.666	
Pertumbuhan unit usaha peternakan	%	1,49	1,88	2,59	3,64	4,26	5,14	

Program/Kegiatan/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Unit Kerja
			2020	2021	2022	2023	2024	
Tersedianya sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan								
Tingkat kemanfaatan sarana prasana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	%	5,60	85	87	90	92	95	
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Juta Rupiah		375.243	352.915	433.969	439.759	445.694	
Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima								
Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai		32,3	32,75	33,5	34	34,5	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat	Skala Likert (1-4)		3,37	3,44	3,51	3,55	3,58	

Program/Kegiatan/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Unit Kerja
			2020	2021	2022	2023	2024	
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan								
Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas								
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	87,82	88,25	88,68	88,93	90,32	90,85	

Lampiran 2. Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ditjen PKH Tahun 2020-2024 (Menjadi)

Program/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Baseline 2019	Sat	Target				Unit Kerja
			2021	2022	2023	2024	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	Jutaan Rp		1.325.051	1.756.502	1.844.328	1.936.544	
Peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik)	4480,8 ribu ton	%	0,85	1,2	1,24	1,28	
Peningkatan Produksi susu	944,54 ribu ton	%	0,55	0,61	0,71	0,85	
Peningkatan Produksi telur	5354,62 ribu ton	%	2,15	2,16	2,16	2,16	
Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan		%	85,2	85,5	85,7	86	
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis		%	80,5	80,5	81	81	

Program/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Baseline 2019	Sat	Target				Unit Kerja
			2021	2022	2023	2024	
Persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis		%	74	74,5	75	76	
Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan		%	91,25	92,25	93,5	94,5	
Peningkatan Produksi Pakan Ternak			113.338	121.958	128.056	134.459	Direktorat Pakan
Terpenuhinya pakan hijauan sesuai kebutuhan							
Peningkatan penggunaan Hijauan Pakan Berkualitas (dalam BK)	66,63	%	69,66	76,22	81,74	84,12	
Terpenuhinya pakan olahan sesuai kebutuhan							
Jumlah pakan ternak sapi untuk produksi		Ton	4.462.673	4.641.820	4.840.588	5.060.899	
Jumlah pakan ternak ayam ras pedaging untuk produksi		Ton	9.758.424	10.052.734	10.347.045	10.641.356	

Program/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Baseline 2019	Sat	Target				Unit Kerja
			2021	2022	2023	2024	
Jumlah pakan ternak itik untuk produksi		Ton	119.929	123.546	127.061	130.780	
Jumlah pakan ternak babi untuk produksi		Ton	1.067.880	1.079.093	1.090.423	1.101.873	
Terpenuhinya pakan ternak perah sesuai kebutuhan							
Jumlah pakan ternak perah untuk produksi susu (sapi perah)		Ton	920.136	942.007	967.002	995.121	
Jumlah pakan ternak untuk ayam petelur		Ton	7.161.613	7.308.677	7.455.026	7.604.643	
Tingkat pemanfaatan sarana pakan		%	90	91	92	93	
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan			152.959	229.549	241.026	253.077	Direktorat Kesehatan Hewan
Meningkatnya mutu, keamanan, dan kesehatan hewan komoditas peternakan dan kesehatan hewan							

Program/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Baseline 2019	Sat	Target				Unit Kerja
			2021	2022	2023	2024	
Persentase ekspor ternak yang disetujui negara tujuan karena alasan kesehatan hewan terhadap total ekspor ternak pernegara tujuan (alasan penolakan : kesehatan hewan)		%	98	98	98	98	
Persentase ekspor non ternak yang disetujui negara tujuan karena alasan keamanan atau kesehatan hewan terhadap total ekspor non ternak pernegara tujuan (alasan penolakan : keamanan atau kesehatan hewan)		%	98	98	98	98	
Persentase ekspor obat hewan yang disetujui negara tujuan karena alasan keamanan dan mutu terhadap total		%	98	98	98	98	

Program/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Baseline 2019	Sat	Target				Unit Kerja
			2021	2022	2023	2024	
ekspor obat hewan per negara tujuan (alasan penolakan : keamanan dan mutu)							
Persentase Kompartemen yang terbebas dari Penyakit Hewan Menular		%	90	90	90	90	
Meningkatnya kesehatan hewan komoditas strategis							
Persentase ternak sapi potong yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak sapi potong (d disesuaikan dinamika populasi)		%	1,92	1,92	1,82	1,82	
Persentase ternak kerbau yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak kerbau (d disesuaikan dinamika populasi)		%	2,25	2,25	2,15	2,15	

Program/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Baseline 2019	Sat	Target				Unit Kerja
			2021	2022	2023	2024	
Persentase ternak kambing yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak kambing		%	5,77	5,77	5,67	5,67	
Persentase ternak domba yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak domba		%	5,12	5,12	5,02	5,02	
Persentase ternak ayam yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak ayam buras		%	12,76	12,76	12,66	12,66	
Persentase ternak ayam yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak ayam ras pedaging		%	2,87	2,87	2,77	2,77	
Persentase ternak itik yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak itik		%	4,51	4,51	4,41	4,41	

Program/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Baseline 2019	Sat	Target				Unit Kerja
			2021	2022	2023	2024	
Persentase ternak babi yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak babi		%	17,65	17,65	17,55	17,55	
Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis							
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit Rabies		%	80,5	80,5	81	81	
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit Avian Influenza		%	80,5	80,5	81	81	
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit Brucellosis		%	80,5	80,5	81	81	
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit Anthrax		%	80,5	80,5	81	81	

Program/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Baseline 2019	Sat	Target				Unit Kerja
			2021	2022	2023	2024	
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit Hog Cholera		%	80,5	80,5	81	81	
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit African swine fever		%	80,5	80,5	81	81	
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit Jembrana		%	80,5	80,5	81	81	
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit Surra		%	80,5	80,5	81	81	
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit Septicemia Epizootica		%	80,5	80,5	81	81	
Meningkatnya kesehatan ternak perah							
Persentase ternak perah yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak perah		%	2,06	2,06	1,96	1,96	

Program/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Baseline 2019	Sat	Target				Unit Kerja
			2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya kesehatan ayam petelur							
Persentase ayam petelur yang mati karena penyakit terhadap total populasi ayam petelur		%	2,76	2,76	2,66	2,66	
Tersedianya sarana prasarana kesehatan hewan							
Tingkat pemanfaatan sarana kesehatan hewan		%	92	93	94	95	
Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak			1.009.794	1.341.734	1.408.821	1.479.262	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak
Meningkatnya mutu produk peternakan untuk komoditas ekspor							
Persentase Ekspor ternak yang diterima negara tujuan karena		%	80	85	85	85	

Program/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Baseline 2019	Sat	Target				Unit Kerja
			2021	2022	2023	2024	
alasan mutu ternak terhadap total ekspor ternak per negara tujuan (alasan penolakan : mutu ternak)							
Terpenuhinya populasi ternak sesuai kebutuhan produksi							
Jumlah populasi ternak sapi siap potong sesuai kebutuhan produksi		Ekor	2.223.000	2.312.239	2.411.252	2.520.996	
Jumlah populasi ternak kerbau siap potong sesuai kebutuhan produksi		Ekor	131.333	132.741	134.478	136.559	
Jumlah populasi ternak kambing siap potong sesuai kebutuhan produksi		Ekor	4.019.912	4.062.127	4.105.137	4.148.945	
Jumlah populasi ternak domba siap potong sesuai kebutuhan produksi		Ekor	4.680.526	4.731.183	4.782.796	4.834.409	

Program/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Baseline 2019	Sat	Target				Unit Kerja
			2021	2022	2023	2024	
Jumlah populasi ternak ayam sesuai kebutuhan produksi		Ekor	3.097.912.245	3.191.344.252	3.284.776.260	3.378.208.267	
Jumlah populasi ternak itik sesuai kebutuhan produksi		Ekor	31.727.269	32.684.153	33.614.037	34.597.921	
Jumlah populasi ternak babi potong sesuai kebutuhan produksi		Ekor	4.037.355	4.079.747	4.122.584	4.165.871	
Terpenuhinya bibit ternak sesuai kebutuhan							
Jumlah bibit sapi potong sesuai kebutuhan produksi		Ekor	1.309	1.471	1.660	1.913	
Jumlah bibit kerbau potong sesuai kebutuhan produksi		Ekor	94	99	99	106	
Jumlah bibit kambing potong sesuai kebutuhan produksi		Ekor	526	610	708	821	

Program/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Baseline 2019	Sat	Target				Unit Kerja
			2021	2022	2023	2024	
Jumlah bibit ayam sesuai kebutuhan produksi		Ekor	617.947	772.716	1.004.811	1.004.871	
Jumlah bibit itik sesuai kebutuhan produksi		Ekor	781.375	792.538	861.156	873.117	
Jumlah bibit babi potong sesuai kebutuhan produksi		Ekor			1.342	1.665	
Tersedianya standar benih dan bibit ternak sesuai kebutuhan							
Rasio standar benih ternak yang dihasilkan terhadap total standar benih ternak yang direncanakan		%	90	90	90	90	
Rasio standar bibit ternak yang dihasilkan terhadap total standar bibit ternak yang direncanakan		%	90	90	90	90	

Program/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Baseline 2019	Sat	Target				Unit Kerja
			2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya ketersediaan benih dan bibit bermutu							
Rasio benih dan bibit yang bersertifikat terhadap total benih dan bibit yang diajukan		%	75	80	85	90	
Meningkatnya produksi susu untuk memenuhi kebutuhan protein nasional							
Produksi susu		Ton	973.470	1.020.142	986.370	994.750	
Jumlah betina laktasi ternak perah sesuai kebutuhan produksi susu		Ekor	254.967	261.262	268.029	275.760	
Jumlah bibit sapi perah sesuai kebutuhan produksi		Ekor	450	1.000	1.000	1.000	
Meningkatnya produksi telur untuk memenuhi kebutuhan protein nasional							

Program/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Baseline 2019	Sat	Target				Unit Kerja
			2021	2022	2023	2024	
Produksi telur		Ton	4.896.101	5.708.206	5.831.570	5.957.807	
Jumlah betina produktif ternak ayam ras petelur sesuai kebutuhan produksi telur		Ekor	273.552.827	279.170.226	284.760.370	290.475.270	
Tersedianya sarana prasarana perbibitan dan produksi ternak							
Tingkat pemanfaatan sarana perbibitan dan produksi ternak		%	91	92	93	95	
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner			1.009.794	1.341.734	1.408.821	1.479.262	Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
Meningkatnya pemenuhan persyaratan sanitary produk hewan pangan dan non pangan yang diterima di negara tujuan							

Program/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Baseline 2019	Sat	Target				Unit Kerja
			2021	2022	2023	2024	
Rasio ekspor produk hewan pangan dan non pangan yang ditolak negara tujuan karena alasan kesehatan, keamanan dan mutu produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan per negara tujuan		%	0	0	0	0	
Meningkatnya daging yang sehat, aman, dan bermutu untuk konsumsi masyarakat							
Rasio penjaminan daging ruminansia yang sehat, aman dan bermutu dikonsumsi terhadap total ternak ruminansia yang dipotong		%	18,4	22,0	23,8	28,3	
Rasio penjaminan daging unggas yang yang sehat, aman dan bermutu	51,3	%	51,7	52,4	52,8	53,5	

Program/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Baseline 2019	Sat	Target				Unit Kerja
			2021	2022	2023	2024	
dikonsumsi terhadap total ternak unggas yang dipotong							
Rasio penjaminan daging babi yang yang sehat, aman dan bermutu dikonsumsi terhadap total ternak babi yang dipotong	1,7	%	1,7	1,7	2,5	3,3	
Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak							
Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	81	%	85,2	85,5	85,7	86	
Persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis	73	%	74	74,5	75	76	
Meningkatnya produk susu dan telur yang sehat, aman, dan							

Program/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Baseline 2019	Sat	Target				Unit Kerja
			2021	2022	2023	2024	
bermutu untuk konsumsi masyarakat							
Rasio produk susu yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk susu yang dihasilkan	88,2	%	88,5	89	89,2	89,5	
Rasio produk telur yang berstatus yang sehat, aman dan bermutu terhadap total produk telur yang dihasilkan	95,2	%	95,5	95,7	96	96,2	
Tersedianya sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner							
Tingkat kemanfaatan sarana kesehatan masyarakat veteriner	90	%	92	93	95	95	
PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI			19.373	26.123	27.429	28.801	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Program/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Baseline 2019	Sat	Target				Unit Kerja
			2021	2022	2023	2024	
							Hasil Peternakan
Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan		%	87	90	92	95	
Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan		%	15	20	25	30	
Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak			19.373	26.123	27.429	28.801	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
Meningkatnya daya saing komoditas hasil peternakan							
Nilai ekspor hewan hidup	75.944	US\$ 000	77.463	92.955	116.194	151.053	
Nilai ekspor produk pangan segar dan olahan	602.474	US\$ 000	692.845	831.414	1.039.268	1.351.048	

Program/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Baseline 2019	Sat	Target				Unit Kerja
			2021	2022	2023	2024	
Nilai ekspor produk non pangan	158.846	US\$ 000	193.792	232.551	290.688	377.895	
Nilai ekspor obat hewan	16.245	US\$ 000	19.494	23.393	29.241	38.013	
Nilai ekspor benih dan bibit ternak	2.526	US\$ 000	905	1.086	1.358	1.765	
Pertumbuhan unit usaha peternakan	1,88	%	2,59	3,64	4,26	5,14	
Meningkatnya nilai tambah komoditas peternakan							
Tingkat pemanfaatan sarana prasana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	5,60	%	87	90	92	95	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			272.531	310.442	325.964	342.262	Sekretariat Ditjen PKH
Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima							

Program/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Baseline 2019	Sat	Target				Unit Kerja
			2021	2022	2023	2024	
Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Nilai	32,75	33,50	34,00	35,5	
Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas							
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Nilai	88,68	88,93	90,32	90,85	
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan			272.531	310.442	325.964	342.262	Sekretariat Ditjen PKH
Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima							

Program/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Baseline 2019	Sat	Target				Unit Kerja
			2021	2022	2023	2024	
Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Nilai	32,75	33,5	34	35,5	
Tingkat kepuasan unit Eselon II di lingkup Ditjen Peternakan terhadap layanan Sekreriat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diberikan		Skala Likert (1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00	
Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan			3	3	3	4	
Persentase rekomendasi BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen PKH yang ditindaklanjuti Ditjen PKH			75	80	85	85	
Persentase rekomendasi hasil audit yang			80	85	90	90	

Program/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Baseline 2019	Sat	Target				Unit Kerja
			2021	2022	2023	2024	
ditindaklanjuti Ditjen PKH terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan Inspektorat Jenderal							
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) Gunung Sindur yang diberikan			3	3	3	3	
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturaden yang diberikan			3	3	3	3	
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan			3	3	3	3	

Program/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Baseline 2019	Sat	Target				Unit Kerja
			2021	2022	2023	2024	
Pakan Ternak (BPTU-HPT) Indrapuri yang diberikan							
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Siborongborong yang diberikan			3	3	3	3	
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mangatas yang diberikan			3	3	3	3	
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-			3	3	3	3	

Program/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Baseline 2019	Sat	Target				Unit Kerja
			2021	2022	2023	2024	
HPT)Sembawa yang diberikan							
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT)Pelaihari yang diberikan			3	3	3	3	
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Denpasar yang diberikan			3	3	3	3	
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari yang diberikan			3	3	3	3	
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan			3	3	3	3	

Program/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Baseline 2019	Sat	Target				Unit Kerja
			2021	2022	2023	2024	
Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang yang diberikan							
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang yang diberikan			3	3	3	3	
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Wates yang diberikan			3	3	3	3	
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Maros yang diberikan			3	3	3	3	
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Denpasar yang diberikan			3	3	3	3	

Program/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Baseline 2019	Sat	Target				Unit Kerja
			2021	2022	2023	2024	
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (B-Vet) Medan yang diberikan			3	3	3	3	
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (B-Vet) Bukit Tinggi yang diberikan			3	3	3	3	
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (B-Vet) Bandar Lampung yang diberikan			3	3	3	3	
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (B-Vet) Banjarbaru yang diberikan			3	3	3	3	
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (B-Vet) Subang yang diberikan			3	3	3	3	

Program/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Baseline 2019	Sat	Target				Unit Kerja
			2021	2022	2023	2024	
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang diberikan			3	3	3	3	
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) Bekasi yang diberikan			3	3	3	3	
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya yang diberikan			3	3	3	3	
Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak							

Program/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Baseline 2019	Sat	Target				Unit Kerja
			2021	2022	2023	2024	
yang efektif, efisien dan akuntabel							
Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak terhadap layanan ketatausahaan			3	3	3	3	
Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Pakan yang efektif, efisien dan akuntabel							
Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Pakan terhadap layanan ketatausahaan			3	3	3	3	
Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Kesehatan							

Program/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Baseline 2019	Sat	Target				Unit Kerja
			2021	2022	2023	2024	
Hewan yang efektif, efisien dan akuntabel							
Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Kesehatan Hewan terhadap layanan ketatausahaan			3	3	3	3	
Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner yang efektif, efisien dan akuntabel							
Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner terhadap layanan ketatausahaan			3	3	3	3	
Terwujudnya pengelolaan manajemen							

Program/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Baseline 2019	Sat	Target				Unit Kerja
			2021	2022	2023	2024	
ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang efektif, efisien dan akuntabel							
Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan terhadap layanan ketatausahaan			3	3	3	3	
Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas							
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	87,82	88,68	88,93	90,32	90,85	

Lampiran 4. Investasi PMDN Sub Sektor Peternakan Tahun 2015-2020

No	Komoditas							Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015 sd 2019	2019 - 2020
PMDN (Rp. Juta)		325.430	465.549	842.756	866.464	1.052.689	2.283.437	37,10	53,90
1	Peternakan Sapi & Kerbau	27.006	28.979	76.131	123.919	174.725	109.863	68,45	-59,04
2	Peternakan Domba & Kambing	0	0	45	0	2.199	2.146	-	-
3	Peternakan Babi	0	0	97.318	26.000	0	10.881	-	-
4	Peternakan Unggas	292.210	436.571	629.872	632.471	875.766	2.160.547	33,14	59,47
5	Peternakan Lainnya	6.214	0	39.391	84.074	0	0	-	-

Lampiran 5. Investasi PMA Sub Sektor Peternakan Tahun 2015-2020

No	Komoditas							Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015 sd 2019	2019 - 2020
PMA (US\$ Ribu)		72.911	48.611	156.333	119.039	37.778	44.443	24,04	15,00
1	Peternakan Sapi & Kerbau	10.289	18.997	2.574	47.632	9.855	3.468	417,31	-184,16
2	Peternakan Domba & Kambing	0	180	4	94	1.900	0	-	-
3	Peternakan Babi	300	145	204	0	0	0	-	-
4	Peternakan Unggas	62.232	25.374	153.150	71.110	24.290	40.975	81,24	40,72
5	Peternakan Lainnya	90	3.915	402	203	1.733	0	-	-

